



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

KODE REKENING PENGANGGARAN KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan Negara, maka kode rekening penganggaran Kabupaten Pacitan perlu adanya perubahan dan penambahan;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioloan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perubahan dan penambahan kode rekening diatur oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b serta guna meningkatkan kualitas pengeioloan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioloan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING PENGANGGARAN KABUPATEN PACITAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah .
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Kode rekening penganggaran yang selanjutnya disebut kode rekening adalah kode rekening yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode rekening yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kode urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- b. Kode Rekening Program dan Kegiatan;
- c. Kode Rekening Pendapatan;
- d. Kode Rekening Belanja; dan
- e. Kode Rekening Pembiayaan.

Pasal 3

Untuk tertib penganggaran kode dihimpm menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening

BAB III KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Setiap urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Organisasi.
- (2) Kode dan klarifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

- (3) Urutan Kode Program dan Kegiatan adalah kode program dan kode kegiatan.
- (4) Kode rincian Program dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V KODE REKENING PENDAPATAN

Pasal 6

Kode pendapatan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Urutan Kode Pendapatan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.
- (2) Kode rincian obyek pendapatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KODE REKENING BELANJA

Pasal 8

Kode belanja yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun Belanja yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Urutan Kode belanja adalah program, kegiatan, jenis, obyek serta rincian obyek.
- (2) Kode rincian obyek belanja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KODE REKENING PEMBIAYAAN

Pasal 10

Kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pembiayaan yang merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Urutan Kode Pembiayaan adalah kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek.
- (2) Kode rincian obyek pembiayaan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VUI PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Kode Rekening Penganggaran Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 - 5 - 2015

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

20 15
25

Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL: 20 - 5 - 2015

**KODE REKENING URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
1	URUSAN WAJIB
1.01	Pendidikan
1.01.01	Dinas Pendidikan
1.02	Kesehatan
1.02.01	Dinas Kesehatan
1.02.02	Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD)
1.03	Pekerjaan Umum
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Pengairan
1.03.02	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
1.04	Perumahan
1.04.01	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
1.05	Penataan Ruang
1.05.01	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
1.06	Perencanaan Pembangunan
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.07	Perhubungan
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.08	Lingkungan Hidup
1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup
1.09	Pertanahan
1.01.01	Dinas Pendidikan
1.02.01	Dinas Kesehatan
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Pengairan
1.20.03	Sekretariat Daerah
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.12.01	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.12.01	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
1.13	Sosial
1.13.01	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14	Ketenagakerjaan
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15.01	Dinas Koperasi dan UKM
1.16	Penanaman Modal

KODE	URAIAN
1.16.01	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
1.17	Kebudayaan
1.17.01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
1.18	Pemuda dan Olah Raga
1.17.01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan
1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.02	Bupati/Wakil Bupati
1.20.03	Sekretariat Daerah
1.20.04	Sekretariat DPRD
1.20.05	Dinas Pendapatan Pengeioloan dan Aset
1.20.06	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.20.07	Inspektorat
1.20.08	Badan Kepegawaian Daerah
1.20.09	Kantor Pendidikan dan Pelatihan
1.20.10	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
1.20.11	Kantor Kecamatan Pacitan
1.20.12	Kantor Kecamatan Kebonagung
1.20.13	Kantor Kecamatan Tulakan
1.20.14	Kantor Kecamatan Ngadirojo
1.20.15	Kantor Kecamatan Sudimoro
1.20.16	Kantor Kecamatan Arjosari
1.20.17	Kantor Kecamatan Tegalombo
1.20.18	Kantor Kecamatan Nawangan
1.20.19	Kantor Kecamatan Bandar
1.20.20	Kantor Kecamatan Pringkuku
1.20.21	Kantor Kecamatan Punung
1.20.22	Kantor Kecamatan Donorojo
1.20.23	Kelurahan Pacitan
1.20.24	Kelurahan Pucangsewu
1.20.25	Kelurahan Sidoharjo
1.20.26	Kelurahan Baleharjo
1.20.27	Kelurahan Ploso
1.21	Ketahanan Pangan
1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.23	Statistik
1.20.06	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
1.24	Kearsipan
1.26.01	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
2	URUSAN PILIHAN
2.01	Pertanian
1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan
2.01.01	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

KODE	URAIAN
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2.02	Kehutanan
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2.03	Energi dan Sumber Daya Mlneral
2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi
2.04	Pariwisata
1.17.01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
2.05	Kelantan dan Perikanan
2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.06	Perdagangan
1.15.01	Dinas Koperasi dan UKM
2.07	Perindustrian
1.15.01	Dinas Koperasi dan UKM
2.08	Ketransmigrasian
1.13.01	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 - 5 - 2015

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KODE	URAIAN
x.xx.01	Program Peayanan Administrasi Perkantoran
x.xx.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat
x.xx.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x.xx.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
x.xx.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
x.xx.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
x.xx.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
x.xx.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan
x.xx.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
x.xx.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
x.xx.01.10	Penyediaan alat tulis kantor
x.xx.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
x.xx.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x.xx.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
x.xx.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga
x.xx.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x.xx.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor
x.xx.01.17	Penyediaan makanan dan minuman
x.xx.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
x.xx.01.19	Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
x.xx.01.20	Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran bagi UPT
x.xx.01.21	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
x.xx.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
x.xx.02.01	Pembangunan rumah jabatan
x.xx.02.02	Pembangunan rumah dinas
x.xx.02.03	Pembangunan gedung kantor
x.xx.02.04	Pengadaan mobil jabatan
x.xx.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
x.xx.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
x.xx.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
x.xx.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
x.xx.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor
x.xx.02.10	Pengadaan Mebeleur
x.xx.02.11	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin persandian
x.xx.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
x.xx.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
x.xx.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
x.xx.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
x.xx.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
x.xx.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

KODE	URAIAN
x.xx.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
x.xx.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
x.xx.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
x.xx.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
x.xx.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala
x.xx.02.31	Pemeliharaan Mesin, jaringan dan pengembangan PABX
x.xx.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
x.xx.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
x.xx.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
x.xx.02.43	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
x.xx.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
x.xx.02.45	Pembangunan Sarana Gedung Kantor
x.xx.02.46	Penyusunan Dokumen Lingkungan
x.xxx.0S	Program peningkatan disiplin aparatur
x.xx.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi
x.xx.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
x.xx.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan
x.xx.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI
x.xx.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
x.xxx.03.20	Dst.....
x.xxx.04	Program fasilitasi pindah /puru tugas PNS
x.xx.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun
x.xx.04.02	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
x.xx.04.03	Pemindahan tugas PNS
x.xx.04.04	Dst.....
x.xxx.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
x.xx.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal
x.xx.05.02	Sosialisasi peraturan perundang undangan
x.xx.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
x.xx.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
x.xx.05.05	Gelar Budaya Kerja
x.xx.05.10	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
x.xx.05.11	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan
x.xx.05.12	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah
x.xx.05.13	Pameran Pelayanan Publik
x.xx.05.14	Penguatan Reformasi Birokrasi
x.xx.05.17	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
x.xx.05.18	Suskalak B Bagi Perangkat Desa/Kelurahan
x.xx.05.20	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah
x.xx.05.22	Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan
x.xx.05.23	Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
x.xx.05.24	Jambore dan Hari Jadi Sat Pol PP
x.xx.05.27	Diklat Peningkatan Kinerja Aparatur Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah
x.xx.05.28	Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP
x.xx.05.29	Kajian Evaluasi Jabatan
x.xx.05.30	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)
x.xx.05.31	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi PNS Daerah

KODE	URAIAN
x.xx.37.12	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah
x.xx.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
x.xx.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
x.xx.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
x.xx.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
x.xx.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
x.xx.06.05	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program KB (termasuk LAKIP dan Penilaian Mandiri)
x.xx.06.07	Administrasi Pelaporan
x.xx.06.08	Penyusunan SAKIP
x.xx.06.09	Monitoring dan Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
x.xx.06.10	Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Barang Daerah
1	URUSAN WAJIB
01	PENDIDIKAN
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.15.01	Pembangunan gedung sekolah
1.01.15.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.15.03	Pembangunan ruang kelas sekolah
1.01.15.04	Penambahan ruang guru sekolah
1.01.15.05	Pembangunan ruang locker siswa
1.01.15.06	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.01.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain
1.01.15.08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01.15.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.15.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1.01.15.11	Pembangunan ruang ibadah
1.01.15.12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1.01.15.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.15.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01.15.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.15.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1.01.15.17	Pengadaan pakaian olahraga
1.01.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.15.19	Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.15.20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.15.21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1.01.15.22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1.01.15.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1.01.15.24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.15.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01.15.26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1.01.15.27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1.01.15.28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1.01.15.29	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain

KODE	URAIAN
1.01.15.30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1.01.15.31	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.15.32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1.01.15.33	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1.01.15.34	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1.01.15.35	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.15.36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1.01.15.37	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01.15.38	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
1.01.15.39	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1.01.15.40	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1.01.15.41	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1.01.15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01.15.43	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.15.44	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
1.01.15.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01.15.46	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
1.01.15.47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
1.01.15.48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
1.01.15.49	Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain
1.01.15.50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
1.01.15.51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.15.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1.01.15.53	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1.01.15.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
1.01.15.55	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.15.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01.15.57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
1.01.15.58	Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini
1.01.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.15.60	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.15.61	Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.15.64	Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.15.66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.15.67	Pembangunan Pagar/Talud Paud
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.16.01	Pembangunan gedung sekolah
1.01.16.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.16.03	Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.16.04	Penambahan ruang guru sekolah
1.01.16.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah dan ruang penunjang lainnya
1.01.16.06	Pembangunan ruang locker siswa
1.01.16.07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

KODE	URAIAN
1.01.16.08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01.16.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.16.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1.01.16.11	Pembangunan ruang ibadah
1.01.16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1.01.16.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.16.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1.01.16.17	Pengadaan pakaian olahraga
1.01.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.16.21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1.01.16.22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1.01.16.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1.01.16.24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.16.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01.16.26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1.01.16.27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1.01.16.28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1.01.16.29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1.01.16.30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.16.31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1.01.16.32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1.01.16.33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1.01.16.34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.16.35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitari
1.01.16.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01.16.37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
1.01.16.38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1.01.16.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1.01.16.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1.01.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01.16.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.16.43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
1.01.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01.16.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
1.01.16.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1.01.16.47	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
1.01.16.48	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
1.01.16.49	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
1.01.16.50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
1.01.16.51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.16.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1.01.16.53	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1.01.16.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
1.01.16.55	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

KODE	URAIAN
1.01.16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01.16.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.16.58	Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi
1.01.16.59	Pelatihan Penyusunan kurikulum
1.01.16.60	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1.01.16.61	Pembinaan SMP Terbuka
1.01.16.62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
1.01.16.63	Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan non-Islam Setara SD dan SMP
1.01.16.64	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah
1.01.16.65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
1.01.16.66	Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTS
1.01.16.67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD
1.01.16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.01.16.69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar
1.01.16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
1.01.16.71	Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)
1.01.16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
1.01.16.74	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
1.01.16.75	Penyediaan beasiswa transisi
1.01.16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1.01.16.77	Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
1.01.16.78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.16.79	Olympiade MIPA SD/SMP
1.01.16.81	Pembinaan Gugus Sekolah Dasar
1.01.16.82	Pembangunan Pagar dan Talud SD/SMP
1.01.16.83	Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah
1.01.16.84	Usaha Kesehatan Sekolah
1.01.16.85	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
1.01.16.86	Penunjang Operasional BOS
1.01.16.87	Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP
1.01.16.88	Lembaga Kepulauan Terpencil
1.01.16.90	Meningkatkan Kopetensi Guru Olah Raga
1.01.17	Program Pendidikan Menengah
1.01.17.01	Pembangunan gedung sekolah Pendidikan Menengah
1.01.17.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.17.03	Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.17.04	Penambahan ruang guru sekolah
1.01.17.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan Lain-lain)
1.01.17.06	Pembangunan ruang locker siswa
1.01.17.07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.01.17.08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01.17.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.17.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1.01.17.11	Pembangunan ruang ibadah
1.01.17.12	Pembangunan perpustakaan sekolah

KODE	URAIAN
1.01.17.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.17.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitari
1.01.17.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.17.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah
1.01.17.17	Pengadaan pakaian olahraga
1.01.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.17.19	Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.17.20	Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.17.21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1.01.17.22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1.01.17.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1.01.17.24	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.17.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01.17.26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1.01.17.27	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1.01.17.28	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1.01.17.29	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1.01.17.30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.17.31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1.01.17.32	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1.01.17.33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1.01.17.34	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.17.35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitari
1.01.17.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01.17.37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
1.01.17.38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1.01.17.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1.01.17.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1.01.17.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01.17.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.17.43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
1.01.17.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01.17.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
1.01.17.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1.01.17.47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
1.01.17.48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
1.01.17.49	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
1.01.17.50	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.17.51	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1.01.17.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1.01.17.53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
1.01.17.54	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.17.55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
1.01.17.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
1.01.17.57	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidikan
1.01.17.58	Pelatihan penyusunan kurikulum
1.01.17.59	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

KODE	URAIAN
1.01.17.60	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan Kepulauan
1.01.17.61	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
1.01.17.62	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
1.01.17.63	Penyelenggaraan Paket C setara SMU
1.01.17.64	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
1.01.17.65	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01.17.66	Peningkatan Kejasama dengan dunia usaha dan dunia industri
1.01.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
1.01.17.68	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
1.01.17.69	Monitoring dan Evaluasi Pendidikan
1.01.17.70	Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK
1.01.17.71	Pembangunan pagar dan Talud
1.01.17.72	Olimpiade MIPA SMA
1.01.17.73	Lomba Kopetensi Siswa Berprestasi
1.01.17.74	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
1.01.17.75	Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun
1.01.17.76	Penunjang Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA dan SMK
1.01.17.77	Pendidikan Kecakapan Hidup
1.01.17.78	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK)
1.01.17.79	Pameran Produk Unggulan SMK
1.01.17.98	Penunjang Operasional BOS SLTA
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal
1.01.18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1.01.18.02	Pembelian bantuan operasional pendidikan non formal
1.01.18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
1.01.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01.18.06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
1.01.18.07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
1.01.18.08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
1.01.18.09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
1.01.18.10	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
1.01.18.11	Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal
1.01.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
1.01.18.18	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.18.14	Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A,B dan C
1.01.18.15	Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI)
1.01.18.16	Hari Anak Nasional (HAN)
1.01.18.17	Jambore PTK - PNF
1.01.18.18	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNF
1.01.18.22	Pembinaan dan Penguatan Lembaga Rumah Pintar Mini (RPM)
1.01.18.81	Pendidikan Kewirausahaan
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa
1.01.19.01	Pembangunan gedung sekolah
1.01.19.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

KODE	URAIAN
1.01.19.03	Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.19.04	Penambahan ruang guru sekolah
1.01.19.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
1.01.19.06	Pembangunan ruang locker siswa
1.01.19.07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.01.19.08	Pembangunan ruang serba guna/aula
1.01.19.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.19.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
1.01.19.11	Pembangunan ruang ibadah
1.01.19.12	Pembangunan perpustakaan sekolah
1.01.19.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.19.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
1.01.19.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.19.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga
1.01.19.17	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.19.18	Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.19.19	Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.19.20	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
1.01.19.21	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
1.01.19.22	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
1.01.19.23	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.19.24	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
1.01.19.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
1.01.19.26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
1.01.19.27	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
1.01.19.28	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
1.01.19.29	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.19.30	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
1.01.19.31	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
1.01.19.32	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
1.01.19.33	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.19.34	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
1.01.19.35	Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar
1.01.19.36	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
1.01.19.37	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
1.01.19.38	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
1.01.19.39	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
1.01.19.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
1.01.19.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01.19.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.19.43	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
1.01.19.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01.19.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
1.01.19.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium an ruang praktikum sekolah
1.01.19.47	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
1.01.19.48	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
1.01.19.49	Rchabilititasi sedang/berat ruang serba guna/aula

KODE	URAIAN
1.01.19.50	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.19.51	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
1.01.19.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
1.01.19.53	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
1.01.19.54	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
1.01.19.55	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi
1.01.19.56	Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
1.01.19.57	Pelatihan Penyusunan kurikulum
1.01.19.58	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
1.01.19.59	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.19.60	Pembinaan Sekolah Inklusi
1.01.19.61	Perlombaan Anak Berkebutuhan Khusus
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01.20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1.01.20.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
1.01.20.05	Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
1.01.20.06	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)
1.01.20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
1.01.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.20.13	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
1.01.20.14	Seleksi Guru Berprestasi
1.01.20.15	pengembangan SIM pendidik dan tenaga kependidikan
1.01.20.17	penilaian kinerja guru
1.01.20.18	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
1.01.20.19	workshop publikasi ilmiah
1.01.20.20	Seleksi Galon Kepala Sekolah
1.01.20.21	olimpiade sains guru
1.01.20.22	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01.20.23	penunjang operasional kepengawasan sekolah
1.01.20.25	pengembangan keprofesian berkelanjutan
1.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.01.21.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
1.01.21.02	Pengembangan minat dan budaya baca
1.01.21.03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.01.21.04	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
1.01.21.05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

KODE	URAIAN
1.01.21.06	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca
1.01.21.07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
1.01.21.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1.01.21.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1.01.21.10	monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.21.12	penyelenggaraan lomba perpustakaan
1.01.21.13	penimban tenaga pengelola perpustakaan sekolah
1.01.21.14	pengadaan buku rumah pintar dan TBM
1.01.21.16	penyelenggaraan implementasi budaya baca
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.01.22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
1.01.22.03	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
1.01.22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
1.01.22.05	Pembinaan dewan Pendidikan
1.01.22.06	Pembinaan Komite Sekolah
1.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.22.10	Sinkronisasi perencanaan pendidikan
1.01.22.11	Lakip dan profil pendidikan
1.01.22.12	Peningkatan manajemen pendidikan (pengeolaan aset, keuangan, kepegawaian dan kelembagaan)
1.01.22.13	Penyelenggaraan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)
1.01.22.15	Penunjang program gridulu mapan
1.01.22.16	Penyusunan questioner dan pengkalan data pendidikan
1.01.22.17	Pengembangan program adiwiyata
1.01.22.18	Workshop standar pelayanan minimal bidang pendidikan
1.01.22.20	Penunjang operasional banyan siswa miskin
1.02	KESEHATAN
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.15.03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
1.02.15.04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1.02.15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.15.07	Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang Farmasi Kabupaten
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.16.01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
1.02.16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02.16.03	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1.02.16.04	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
1.02.16.05	Perbaikan gizi masyarakat

KODE	URAIAN
1.02.16.06	Revitalisasi sistem kesehatan
1.02.16.07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
1.02.16.08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
1.02.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02.16.11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02.16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1.02.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1.02.16.15	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
1.02.16.16	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
1.02.16.17	Pelayanan kesehatan dasar Puskesmas
1.02.16.18	Peningkatan SDM Kesehatan
1.02.16.19	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
1.02.16.21	Pembinaan kesehatan anak , remaja dan usila
1.02.16.24	Peningkatan Kapasitas Poskesdes
1.02.16.26	Peningkatan sarana dan regulasi Kesehatan
1.02.16.27	Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
1.02.16.30	Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1.02.17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02.17.03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
1.02.17.04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
1.02.17.05	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
1.02.18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1.02.18.01	Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat
1.02.18.02	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia
1.02.18.03	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri
1.02.18.04	Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
1.02.18.05	Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait
1.02.18.06	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
1.02.18.07	Dst.....
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.19.01	Pengembangan media promosi dari informasi sadar hidup sehat
1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02.19.03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
1.02.19.04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
1.02.19.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.19.08	Pengembangan Desa Siaga
1.02.19.11	Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
1.02.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin

KODE	URAIAN
1.02.20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1.02.20.05	Penanggulangan Gizi lebih
1.02.20.06	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
1.02.20.08	Pengadaan MP Asi dan obat penunjang Gizi
1.02.20.10	Pengenaan gizi buruk pada balita dan ibu hamil
1.02.20.11	Peningkatan pemanfaatan ASI eksklusif
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1.02.21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.02.21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1.02.21.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.21.05	Pengembangan Kabupaten Sehat
1.02.21.09	Penyelenggaraan Lingkungan Sehat
1.02.21.10	Pengembangan sanitasi sehat berbasis masyarakat
1.02.21.11	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02.22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
1.02.22.03	Pengadaan vaksin penyakit menular
1.02.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.02.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02.22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
1.02.22.07	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
1.02.22.08	Peningkatan Imunisasi
1.02.22.09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1.02.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1.02.22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.22.12	Pemberantasan Penyakit Menular
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan
1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1.02.23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1.02.23.04	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
1.02.23.05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
1.02.23.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.23.07	Pengembangan dan Pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan
1.02.23.08	Pengembangan Puskesmas ISO
1.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.24.01	Pelayanan operasi katarak
1.02.24.02	Pelayanan kesehatan THT
1.02.24.03	Pelayanan operasi bibir sumbing
1.02.24.04	Pelayanan sunatan masal
1.02.24.05	Penanggulangan ISPA

KODE	URAIAN
1.02.24.06	Penanggulangan penyakit cacangan
1.02.24.07	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
1.02.24.08	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
1.02.24.09	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu
1.02.24.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02.25.01	Pembangunan puskesmas
1.02.25.02	Pembangunan puskesmas pembantu
1.02.25.03	Pengadaan puskesmas perairan
1.02.25.04	Pengadaan puskesmas keliling
1.02.25.05	Pembangunan posyandu
1.02.25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1.02.25.08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1.02.25.09	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan
1.02.25.10	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
1.02.25.11	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
1.02.25.12	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
1.02.25.13	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
1.02.25.14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
1.02.25.15	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
1.02.25.16	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan
1.02.25.17	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
1.02.25.18	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu
1.02.25.19	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap
1.02.25.20	Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas
1.02.25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
1.02.25.22	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan
1.02.25.23	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.25.25	Rehab Sedang/Berat Puskesmas
1.02.25.27	Pembangunan Poskesdes (DAK)
1.02.25.30	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak asap rokok di Dinas Kesehatan
1.02.25.32	Pengadaan Peralatan Kesehatan
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.02.26.01	Pembangunan rumah sakit
1.02.26.02	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
1.02.26.03	Pembangunan gudang obat/apotik
1.02.26.04	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas I, II dan III)
1.02.26.05	Pengembangan ruang gawat darurat
1.02.26.06	Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU
1.02.26.07	Pengembangan ruang operasi
1.02.26.08	Pengembangan ruang terapi
1.02.26.09	Pengembangan ruang isolasi
1.02.26.10	Pengembangan ruang bersalin
1.02.26.11	Pengembangan ruang inkubator
1.02.26.12	Pengembangan ruang bayi

KODE	URAIAN
1.02.26.13	Pengembangan ruang rontgen
1.02.26.14	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
1.02.26.15	Pembangunan kamar jenazah
1.02.26.16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02.26.17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02.26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1.02.26.21	Pengadaan mebeleur rumah sakit
1.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02.26.24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
1.02.26.25	Pengembangan tipe rumah sakit
1.02.26.26	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.26.28	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit untuk penanganan penderita penyakit akibat dampak rokok
1.02.26.30	Pembangunan ruang rawat inap kelas III
1.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.02.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02.27.02	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
1.02.27.03	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
1.02.27.04	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas I, II dan III)
1.02.27.05	Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
1.02.27.06	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU
1.02.27.07	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
1.02.27.08	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
1.02.27.09	Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi
1.02.27.10	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
1.02.27.11	Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
1.02.27.12	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
1.02.27.13	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
1.02.27.14	Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
1.02.27.15	Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
1.02.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.27.18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
1.02.27.19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit
1.02.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
1.02.27.21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.27.22	Dst.....
1.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1.02.28.02	Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
1.02.28.03	Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
1.02.28.04	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
1.02.28.05	Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
1.02.28.06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

KODE	URAIAN
1.02.28.07	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
1.02.28.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.28.11	Pendidikan dan Pelatihan sumber daya rumah sakit
1.02.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1.02.29.01	Penyuluhan kesehatan anak balita
1.02.29.02	Imunisasi bagi anak balita
1.02.29.03	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
1.02.29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1.02.29.05	Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
1.02.29.06	Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita
1.02.29.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.29.08	Peningkatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak
1.02.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1.02.30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan
1.02.30.02	Rekrutmen tenaga perawat kesehatan
1.02.30.03	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
1.02.30.04	Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
1.02.30.05	Pembangunan panti asuhan
1.02.30.06	Pelayanan kesehatan Lansia
1.02.30.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1.02.31.01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
1.02.31.02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
1.02.31.03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
1.02.31.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.02.32.01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1.02.32.02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
1.02.32.03	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
1.02.32.04	Dst
1.02.33	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
1.02.33.01	Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan
1.02.33.02	Pengadaan Sarana rumah sakit
1.03	PEKERJAAN UMUM
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.0315.01	Perencanaan pembangunan jalan
1.03.15.02	Survei kontur jalan dan jembatan
1.03.15.03	Pembangunan jalan
1.03.15.04	Perencanaan pembangunan jembatan
1.03.15.05	Pembangunan jembatan
1.03.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KODE	URAIAN
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1.03.16.01	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03.16.02	Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
1.03.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03.16.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.16.05	Pemeliharaan Rutin saluran drainase kota
1.03.16.06	Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
1.03.16.08	Normalisasi Saluran Drainase
1.03.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1.03.17.01	Perencanaan turap/talud/bronjong
1.03.17.02	Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
1.03.17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.17.05	Dst.....
1.03.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.18.01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.18.02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03.18.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.18.06	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
1.03.19.01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1.03.19.02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
1.03.19.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1.03.20.01	Inspeksi kondisi jalan
1.03.20.02	Inspeksi kondisi jembatan
1.03.20.03	Evaluasi dan pelaporan
1.03.20.04	Dst
1.03.21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1.03.21.01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
1.03.21.02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
1.03.21.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.21.04	Dst
1.03.22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
1.03.22.01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan
1.03.22.02	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
1.03.22.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03.23.01	Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
1.03.23.02	Pembangunan gedung workshop
1.03.23.03	Pembangunan laboratorium kebinamargaan
1.03.23.04	Pengadaan alat-alat berat

KODE	URAIAN
1.03.23.05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1.03.23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1.03.23.07	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan
1.03.23.08	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
1.03.23.09	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
1.03.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03.23.11	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
1.03.23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
1.03.23.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.23.14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Alat-alat Berat
1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03.24.02	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
1.03.24.03	Perencanaan pembangunan reservoir
1.03.24.04	Perencanaan pembangunan pintu air
1.03.24.05	Perencanaan normalisasi saluran sungai
1.03.24.06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum
1.03.24.07	Pembangunan reservoir
1.03.24.08	Pembangunan pintu air
1.03.24.09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
1.03.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03.24.11	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
1.03.24.12	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
1.03.24.13	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
1.03.24.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
1.03.24.15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1.03.24.16	Pemberdayaan petani pemakai air
1.03.24.17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.24.18	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.24.20	Perbaikan Saluran Tutup (Trotoar) Kota
1.03.24.21	Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi
1.03.24.25	Operasional dewan sumber daya air
1.03.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1.03.25.01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03.25.02	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03.25.03	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.03.25.04	Pembangunan sumur-sumur air tanah
1.03.25.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
1.03.25.06	Peningkatan distribusi penyediaan air baku
1.03.25.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.25.08	Dst
1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03.26.01	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03.26.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03.26.03	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

KODE	URAIAN
1.03.26.04	Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
1.03.26.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
1.03.26.06	Peningkatan konservasi air tanah
1.03.26.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1.03.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1.03.27.03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
1.03.27.04	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
1.03.27.05	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
1.03.27.06	Pengembangan sistem distribusi air minum
1.03.27.07	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
1.03.27.08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
1.03.27.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.28	Program Pengendalian Banjir
1.03.28.01	Pembangunan reservoir pengendali banjir
1.03.28.02	Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1.03.28.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1.03.28.04	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir
1.03.28.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
1.03.28.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
1.03.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
1.03.28.08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
1.03.28.09	Pembangunan prasarana pengaman pantai
1.03.28.10	Pembangunan tanggul pemecah ombak
1.03.28.11	Monitoring , evaluasi dan pelaporan
1.03.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03.29.01	Perencanaan pengembangan infrastruktur
1.03.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.03.29.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.29.04	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
1.03.29.05	Pembangunan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL)
1.03.29.06	Pembangunan Lingkungan Monumen Panglima Sudirman
1.03.29.08	Peningkatan taman kota dan jalur hijau
1.03.29.09	Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)
1.03.29.10	Pematangan Lahan dan Urukan
1.03.29.13	Pembangunan Tugu Batas Kabupaten
1.03.29.15	Riview RPJM bidang cipta karya
1.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
1.03.30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan
1.03.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan
1.03.30.03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (DID/DAK)
1.03.30.04	Pembangunan pasar perdesaaan
1.03.30.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

KODE	URAIAN
1.03.30.06	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
1.03.30.07	Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar perdesaan
1.03.30.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.30.09	Pengadaan bahan infrastuktur desa perdesaan
1.03.31	Program Dst
1.04	PERUMAHAN
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan
1.04.15.01	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
1.04.15.02	Penyuluhan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
1.04.15.03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
1.04.15.04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
1.04.15.05	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
1.04.15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1.04.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
1.04.15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.04.16.01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
1.04.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
1.04.16.03	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
1.04.16.04	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
1.04.16.05	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
1.04.16.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04.16.07	Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan
1.04.16.08	Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
1.04.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1.04.17.01	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
1.04.17.02	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
1.04.17.03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
1.04.17.04	Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah
1.04.17.05	Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
1.04.17.06	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
1.04.17.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04.17.08	Fasilitasi dan stimulan Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)
1.04.18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
1.04.18.01	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
1.04.18.02	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
1.04.18.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04.18.04	Dst

KODE	URAIAN
1.04.19	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.04.19.01	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.02	Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.03	Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung
1.04.19.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
1.04.19.05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
1.04.19.06	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
1.04.19.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04.19.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
1.04.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.04.19.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04.19.14	Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadaman Kebakaran (PMK)
1.04.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1.04.20.01	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman
1.04.20.02	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
1.04.20.03	Koordinasi pengeioloan areal pemakaman
1.04.20.04	Koordinasi penataan areal pemakaman
1.04.20.05	Pemberian perijinan pemakaman
1.04.20.06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
1.04.20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1.04.20.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.04.20.09	Dst
1.05	PENATAAN RUANG
1.05.15	Program Perencanaan Tata Ruang
1.05.15.01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
1.05.15.02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
1.05.15.03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1.05.15.04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
1.05.15.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.05.15.06	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
1.05.15.07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
1.05.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
1.05.15.09	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
1.05.15.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
1.05.15.11	Revisi rencana tata ruang
1.05.15.12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
1.05.15.13	Survey dan pemetaan
1.05.15.14	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota
1.05.15.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
1.05.15.16	Penyusunan Raperda tentang RDTR

KODE	URAIAN
1.05.16	Program Pemanfaatan Ruang
1.05.16.01	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
1.05.16.02	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
1.05.16.03	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.16.04	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
1.05.16.05	Survey dan pemetaan
1.05.16.06	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
1.05.16.07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1.05.16.08	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1.05.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
1.05.16.10	Fasilitasi program pengembangan kota hijau (P2KH)
1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05.17.01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.17.02	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.17.03	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.17.04	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.17.05	Pengawasan pemanfaatan ruang
1.05.17.06	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
1.05.17.07	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.05.17.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.05.17.09	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang
1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.15	Program Pengembangan Data/Informasi
1.06.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
1.06.15.02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06.15.03	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
1.06.15.04	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
1.06.15.05	Penyusunan profile daerah
1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan
1.06.16.01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
1.06.16.02	Koordinasi kerjasam pembangunan antar daerah
1.06.16.03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
1.06.16.04	Koordinasi dalam pemecahanan masalah-masalah daerah
1.06.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1.06.17.01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
1.06.17.02	Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara
1.06.17.03	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
1.06.17.04	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
1.06.17.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KODE	URAIAN
1.06.17.06	Dst
1.06.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.06.18.01	Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.06.18.02	Koordinasi penetapan rencana rata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.06.18.03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.06.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.18.05	Fasilitasi Perencanaan fisik dan prasarana dikawasan strategis dan cepat tumbuh
1.06.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
1.06.19.01	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
1.06.19.02	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
1.06.19.03	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/social
1.06.19.04	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
1.06.19.05	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
1.06.19.06	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan
1.06.19.07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
1.06.19.08	Koordinasi perencanaan penanganan perpajakan
1.06.19.09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
1.06.19.10	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
1.06.19.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.19.12	Dst
1.06.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1.06.20.02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
1.06.20.03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
1.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.06.21.02	Penyusunan rancangan RPJPD
1.06.21.03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
1.06.21.04	Penetapan RPJPD
1.06.21.05	Penyusunan rancangan RPJMD
1.06.21.06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
1.06.21.07	Penetapan RPJMD
1.06.21.08	Penyusunan rancangan RKPD
1.06.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06.21.10	Penetapan RKPD
1.06.21.11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1.06.21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKP)
1.06.21.13	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1.06.21.16	Penyusunan Rancangan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

KODE	URAIAN
1.06.21.20	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.21.22	Koordinasi perencanaan dan penyusunan laporan kinerja pembangunan daerah
1.06.21.41	Peningkatan pengeioloan perencanaan pembangunan daerah
1.06.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.06.22.01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
1.06.22.02	Penyusunan indikator ekonomi daerah
1.06.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
1.06.22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06.22.05	Penyusuman tabel input output daerah
1.06.22.06	Penyusuman masterplan penanggulangan kemiskinan
1.06.22.07	Penyusuman indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
1.06.22.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.22.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Anti Proverty Program (APP)
1.06.22.17	Penyusunan analysis indikator ekonomi daerah
1.06.22.18	Penyusuman database infrastruktur pertanian
1.06.22.19	Fasilitasi bidang ekonomi
1.06.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1.06.23.01	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
1.06.23.02	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
1.06.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06.23.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang Sosial Budaya
1.06.23.05	Fasilitasi Bidang Sosial Budaya
1.06.23.09	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1.06.23.15	Updating database bidang sosial budaya
1.06.23.16	Penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya
1.06.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06.24.01	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
1.06.24.02	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.06.24.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.24.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah
1.06.24.05	Fasilitasi Perencanaan Prasarana Wilayah
1.06.24.20	Fasilitasi perencanaan prasarana perhubungan, pengairan dan sumber daya alam
1.06.24.21	Fasilitasi perencanaan prasarana pemukiman dan lingkungan hidup
1.06.25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
1.06.25.01	Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana
1.06.25.02	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
1.06.25.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.25.04	Dst
1.07	PERHUBUNGAN
1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.07.15.02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

KODE	URAIAN
1.07.15.03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.07.15.04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
1.07.15.05	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
1.07.15.06	Peningkatan pengeioloan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
1.07.15.07	Peningkatan pengeioloan terminal angkutan darat
1.07.15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07.15.09	Intensifikasi PAD bidang Perhubungan
1.07.15.10	Fasilitasi Pelayanan Bidang Perhubungan
1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LW
1.07.16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1.07.16.02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
1.07.16.03	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
1.07.16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
1.07.16.05	Pemeliharaan APILL (Traffic Light dan Warning Light)
1.07.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.17.01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
1.07.17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
1.07.17.03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
1.07.17.04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
1.07.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
1.07.17.06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
1.07.17.07	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
1.07.17.08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
1.07.17.09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
1.07.17.10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
1.07.17.11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
1.07.17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
1.07.17.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
1.07.17.14	Sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07.17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1.07.17.16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
1.07.17.17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07.17.19	Pengumpulan Data Base Bidang Perhubungan
1.07.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.18.01	Pembangunan gedung terminal
1.07.18.02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
1.07.18.03	Pembangunan jembatan penyeberangan gedung terminal
1.07.18.04	Pengembangan Pelayanan Perhubungan Laut
1.07.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.07.19.02	Pengadaan marka jalan

KODE	URAIAN
1.07.19.03	Pengadaan pagar pengaman jalan
1.07.19.04	Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas
1.07.19.05	Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas
1.07.20	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.20.01	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
1.07.20.02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
1.07.20.03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
1.07.20.04	Dst
1.07.21	Program Dst
1.08	LINGKUNGAN HIDUP
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08.15.01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
1.08.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1.08.15.03	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
1.08.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1.08.15.05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
1.08.15.06	Bimbingan teknis persampahan
1.08.15.07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
1.08.15.08	Kerjasama pengelolaan sampah
1.08.15.09	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
1.08.15.10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1.08.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.08.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.15.13	Dst
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.16.01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08.16.02	Koordinasi penilaian langit biru
1.08.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.08.16.05	Koordinasi peneruban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
1.08.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3
1.08.16.07	Pengkajian dampak lingkungan
1.08.16.08	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
1.08.16.09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
1.08.16.10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
1.08.16.11	Pengembangan produksi ramah lingkungan
1.08.16.12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL
1.08.16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1.08.16.15	Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif
1.08.16.16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.16.17	Koordinasi Penilaian Adiwiyata di Kabupaten Pacitan
1.08.16.18	Penerapan Manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)

KODE	HIRAIAN
1.08.16.19	Pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi dibidang usaha terkait lingkungan hidup
1.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08.17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
1.08.17.02	Pantai dan Laut Lestari
1.08.17.03	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut
1.08.17.04	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Ungkungan
1.08.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1.08.17.06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
1.08.17.07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
1.08.17.08	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
1.08.17.09	Koordinasi pengeioloan konservasi SDA
1.08.17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
1.08.17.11	Pengembangan dan Pengeioloan Kawasan World Heritage Laut
1.08.17.12	Pengembangan Kerjasama Pengeioloan Kawasan Konservasi Laut Regional
1.08.17.13	Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan
1.08.17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1.08.17.15	Koordinasi peningkatan pengeioloan kawasan konservasi
1.08.17.16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.17.17	Dst
1.08.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1.08.18.01	Pengeioloan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
1.08.18.02	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.08.18.03	Rehabilitasi hutan dan lahan
1.08.18.04	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
1.08.18.05	Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
1.08.18.06	Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
1.08.18.07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
1.08.18.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08.19.01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1.08.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.08.19.03	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah
1.08.19.04	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
1.08.19.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.19.06	Dst
1.08.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1.08.20.01	Pengujian emisi kendaraan bermotor
1.08.20.02	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

KODE	URAIAN
1.08.20.03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
1.08.20.04	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
1.08.20.05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
1.08.20.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.20.07	Dst
1.08.21	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan
1.08.21.01	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi
1.08.21.02	Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
1.08.21.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.21.04	Dst
1.08.22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan
1.08.22.01	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
1.08.22.02	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
1.08.22.03	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
1.08.22.04	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
1.08.22.05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
1.08.22.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.22.07	Dst
1.08.23	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1.08.23.01	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1.08.23.02	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
1.08.23.03	Dst
1.08.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.08.24.01	Penyusunan kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
1.08.24.02	Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
1.08.24.03	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
1.08.24.04	Penyusunan program pengembangan RTH
1.08.24.05	Penataan RTH
1.08.24.06	Pemeliharaan RTH
1.08.24.07	Pengembangan taman rekreasi
1.08.24.08	Pengawasan dan pengendalian RTH
1.08.24.09	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
1.08.24.10	Monitoring dan evaluasi
1.09	PERTANAHAN
1.09.15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
1.09.15.01	Penyusunan sistem pendaftaran tanah
1.09.15.02	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
1.09.15.03	Dst
1.09.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.09.16.01	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

KODE	URAIAN
1.09.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
1.09.16.03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
1.09.16.04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
1.09.16.05	Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.09.16.08	Penyusunan Data Base Tanah Aset Pemerintah Daerah
1.09.16.09	Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah
1.09.16.10	Fasilitasi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan aset Pemerintah Daerah
1.09.16.11	Penanaman Rupabumi Wilayah
1.09.17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
1.09.17.01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1.09.17.02	Dst
1.09.18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
1.09.18.01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
1.09.18.02	Dst
1.09.19	Program Dst
1.10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10.15.01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
1.10.15.02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK
1.10.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
1.10.15.04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
1.10.15.05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
1.10.15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
1.10.15.07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
1.10.15.08	Pengembangan data base kependudukan
1.10.15.09	Penyusunan kebijakan kependudukan
1.10.15.10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1.10.15.11	Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10.15.12	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
1.10.15.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.10.15.15	Penataan dan pengeolaan arsip
1.11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1.11.15.01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
1.11.15.02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
1.11.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11.15.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.15.05	Dst

KODE	URAIAN
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengamsutamaan Gender dan Anak
1.11.16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
1.11.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
1.11.16.03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
1.11.16.04	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
1.11.16.05	Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak
1.11.16.06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1.11.16.07	Evaluasi pelaksanaan PUG
1.11.16.08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
1.11.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.16.10	Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi perempuan dalam rangka penguatan ekonomi keluarga di lingkungan industri rokok dan perkebunan tembakau (cukai)
1.11.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11.17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
1.11.17.02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
1.11.17.03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
1.11.17.04	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
1.11.17.05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
1.11.17.06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
1.11.17.07	Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
1.11.17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1.11.17.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1.11.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
1.11.18.02	Kegiatan pendidikan dan petatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
1.11.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1.11.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
1.11.18.05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
1.11.18.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.18.07	Dst
1.11.19	Program Penguatan Kelembagaan Pengamsutamaan Gender dan Anak
1.11.19.01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
1.11.19.02	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
1.11.19.03	Dst
1.12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.12.15	Program Keluarga Berencana
1.12.15.01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

KODE	URAIAN
1.12.15.02	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
1.12.15.03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
1.12.15.04	Promosi Pelayanan Khiba
1.12.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana
1.12.15.06	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
1.12.15.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengeioloan Program KB
1.12.15.10	Penunjang Harganas
1.12.15.11	Pembinaan Ketahanan Keluarga Terpadu Bersumberdaya Masyarakat
1.12.15.12	Pelatihan Kader Kelompok Bina Keluarga
1.12.15.21	Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin
1.12.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1.12.16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1.12.16.02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
1.12.17	Program Pelayanan Kontrasepsi
1.12.17.01	Pelayanan konseling KB
1.12.17.02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1.12.17.03	Pengadaan alat kontrasepsi
1.12.17.04	Pelayanan KB medis operasi
1.12.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
1.12.18.01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
1.12.18.02	Pengeioloan data dan informasi program KB
1.12.18.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.12.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
1.12.19.01	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
1.12.19.02	Dst
1.12.20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
1.12.20.01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
1.12.20.02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya dliuar sekolah
1.12.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
1.12.21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
1.12.21.02	Dst
1.12.22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12.22.01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.12.22.02	Dst
1.12.23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1.12.23.01	Pelatihan tenaga pendamping kekompok bina keluarga di kecamatan
1.12.23.02	Dst

KODE	URAIAN
1.12.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
1.12.24.01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
1.12.24.02	Dst
1.13	SOSIAL
1.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya
1.13.15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1.13.15.02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.13.15.03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
1.13.15.04	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
1.13.15.05	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.13.15.06	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.13.15.07	Pembangunan pemberdayaan daerah terpencil dan tertinggal (P2DT)
1.13.15.09	Verifikasi dan validasi data kepersetaan JKN
1.13.15.13	Mengirim anak ke PSPA Batu Malang
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.16.01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
1.13.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
1.13.16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13.16.04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
1.13.16.05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
1.13.16.06	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
1.13.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1.13.16.08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1.13.16.09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1.13.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.13.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Data Rumah Tidak Layak Huni
1.13.16.13	Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional
1.13.17	Program Pembinaan Anak Terlantar
1.13.17.01	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
1.13.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
1.13.17.03	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
1.13.17.04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
1.13.17.05	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
1.13.17.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1.13.18.01	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

KODE	URAIAN
1.13.18.02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan taruma
1.13.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1.13.18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1.13.18.05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
1.13.19	Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo
1.13.19.01	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
1.13.19.02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo
1.13.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
1.13.19.05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
1.13.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13.19.07	Pembinaan Kesejahteraan Lanjut Usia
1.13.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.13.20.01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1.13.20.02	Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
1.13.20.03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
1.13.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
1.13.20.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13.20.06	Sosialisasi tentang dampak narkoba dan HIV/AIDS
1.13.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1.13.21.02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1.13.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1.13.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
1.13.21.05	Pemberdayaan peran aktif karang taruna dalam dunia usaha
1.13.21.07	Pendataan PMKS dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
1.13.21.08	Operasional Program Keluarga Harapan
1.14	KETENAGAKERJAAN
1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah
1.14.15.02	Pembangunan balai latihan kerja
1.14.15.03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
1.14.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
1.14.15.05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
1.14.15.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
1.14.15.08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK
1.14.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14.15.11	Pelatihan dan ketrampilan kerja masyarakat di sekitar daerah industri hasil tembakau dan/ atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (cukai)
1.14.15.12	Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri kecil

KODE	URAIAN
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14.16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1.14.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.14.16.03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan
1.14.16.04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1.14.16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
1.14.16.06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
1.14.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14.16.08	Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi
1.14.16.09	Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL AKAD dan AKAN
1.14.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.14.17.01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
1.14.17.02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1.14.17.03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1.14.17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1.14.17.05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.14.17.06	Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
1.14.17.07	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
1.14.17.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.14.17.09	Penetapan upah minimum Kabupaten
1.14.18	Program Dst
1.15	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.15.15	Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha KecU Menengah Yang Kondusif
1.15.15.01	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
1.15.15.02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
1.15.15.03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah
1.15.15.04	Pendirian unit penanganan pengaduan
1.15.15.05	Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional
1.15.15.06	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15.15.07	Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
1.15.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15.15.09	Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
1.15.15.10	Pemberian fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
1.15.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.15.15.12	Penilaian Kesehatan Bagi KSP/USP
1.15.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha KecU Menengah
1.15.16.01	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

KODE	URAIAN
1.15.16.02	Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
1.15.16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.16.04	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI
1.15.16.05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
1.15.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15.16.07	Pelatihan manajemen pengeioloan Koperasi/KUD
1.15.16.08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kedl Nfenengah
1.15.16.09	Sosialisasi dan pelatihan pola pengeioloan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.16.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.15.16.11	Pameran Produk Unggulan
1.15.16.12	Bimbingan Teknis Kewirausahaan
1.15.16.14	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
1.15.17.02	Pengembangan klaster bisnis
1.15.17.03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
1.15.17.04	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.17.05	Pemantauan pengeioloan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.17.06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.17.07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
1.15.17.08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
1.15.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.17.10	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
1.15.17.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.15.17.12	Fasilitasi Dana Bergulir
1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15.18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
1.15.18.02	Peningkatan sarana dam prasana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
1.15.18.03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
1.15.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
1.15.18.05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
1.15.18.06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
1.15.18.07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
1.15.18.08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
1.15.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.15.18.15	Diklat teknis perkoperasian
1.15.18.16	Pembinaan Kelembagaan Koperasi
1.15.19	Program Dst

KODE	URAIAN
1.16	PENANAMAN MODAL
1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.16.15.01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
1.16.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah
1.16.15.03	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)
1.16.15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendataan pelaksanaan investasi PMDN/PMA
1.16.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
1.16.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
1.16.15.07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
1.16.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1.16.15.09	Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
1.16.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi
1.16.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.16.16	Program Peningkatan, Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.16.16.01	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
1.16.16.02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
1.16.16.03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal
1.16.16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
1.16.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
1.16.16.06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
1.16.16.07	Kajian kebijakan penanaman modal
1.16.16.08	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal
1.16.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.16.16.10	Sosialisasi Pelayanan Perizinan
1.16.16.11	Pendampingan ISO
1.16.16.13	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
1.16.16.17	Peningkatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1.16.16.18	Penatalaksanaan pelayanan perijinan terpadu satu pintu
1.16.17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
1.16.17.01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
1.16.17.01	Dst
1.17	KEBUDAYAAN
1.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.17.15.02	Penatagunaan naskah kuno nusantara
1.17.15.03	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
1.17.15.04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
1.17.15.05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

KODE	URAIAN
1.17.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.16.01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1.17.16.02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
1.17.16.03	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.17.16.04	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya bakal daerah
1.17.16.05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
1.17.16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1.17.16.07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah
1.17.16.08	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
1.17.16.09	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
1.17.16.10	Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
1.17.16.11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
1.17.16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
1.17.16.13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
1.17.16.15	Pengembangan nilai dan geografi sejarah
1.17.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17.17.02	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan
1.17.17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan
1.17.17.04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
1.17.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17.17.06	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
1.17.17.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1.17.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.18.01	Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
1.17.18.02	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah
1.17.18.03	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
1.17.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.17.18.05	Dst
1.18	PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.18.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1.18.15.01	Pendataan potensi kepemudaan
1.18.15.02	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
1.18.15.03	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
1.18.15.04	Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH
1.18.15.05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
1.18.15.06	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda
1.18.15.07	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
1.18.15.08	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
1.18.15.09	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
1.18.15.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KODE	URAIAN
1.18.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.18.16.01	Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
1.18.16.03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
1.18.16.04	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
1.18.16.05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
1.18.16.06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
1.18.16.07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
1.18.16.08	Pameran prestasi hasil karya pemuda
1.18.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.18.16.10	Pembinaan dan Pengiriman PASKIBRAKA
1.18.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemnda
1.18.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.18.17.02	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
1.18.17.03	Dst
1.18.18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
1.18.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
1.18.18.02	Dst
1.18.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
1.18.19.01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
1.18.19.02	Pengembangan Sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
1.18.19.03	Pengembangan perencanaan olah raga terpadu
1.18.19.04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
1.18.19.05	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
1.18.19.06	Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
1.18.19.07	Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga
1.18.19.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.18.19.09	Dst
1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18.20.01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
1.18.20.02	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
1.18.20.03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1.18.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
1.18.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.18.20.07	Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
1.18.20.08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
1.18.20.09	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
1.18.20.10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
1.18.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi
1.18.20.12	Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga
1.18.20.13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
1.18.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

KODE	URAIAN
1.18.20.15	Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
1.18.20.16	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olah raga
1.18.20.17	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
1.18.20.18	Dst
1.18.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.18.21.01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.18.21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.18.21.03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.18.21.05	Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olah raga
1.18.21.06	Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
1.18.21.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1.18.21.08	Dst
1.18.22	Program Dst
1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.15.02	Pembangunan pos jaga/ronda
1.19.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.15.04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
1.19.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan
1.19.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.15.07	Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)
1.19.15.08	Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Kabupaten Pacitan (PAKEM)
1.19.15.09	Forum kewaspadaan dini masyarakat
1.19.15.10	Pemantauan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
1.19.15.12	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.15.13	Operasional Tim Terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1.19.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19.16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
1.19.16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.19.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.16.06	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
1.19.16.08	Pengawasan dan penertiban rokok ilegal
1.19.16.09	Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan pelaksanaan Perda
1.19.16.10	Penyelidikan dan Penyidikan pelanggaran Perda

KODE	URAIAN
1.19.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19.17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
1.19.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.19.17.04	Forum kerukunan umat beragama
1.19.17.05	Sosialisasi Wawasan kebangsaan Bagi Tokoh Pemuda, Ormas dan Tomas
1.19.17.06	Sosialisasi pembaruan kebangsaan
1.19.17.07	Sosialisasi HAM
1.19.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.18.01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.19.18.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
1.19.18.03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.19.18.04	Dst
1.19.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.19.19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
1.19.19.02	Operasional dan Pembinaan I inmas Inti
1.19.19.03	Pengamanan Daerah
1.19.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
1.19.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
1.19.20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
1.19.20.03	Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
1.19.20.04	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
1.19.20.05	Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan
1.19.20.06	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
1.19.20.07	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur
1.19.20.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.20.09	Dst
1.19.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat
1.19.21.02	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
1.19.21.03	Komunikasi forum-forum diskusi politik
1.19.21.04	Penyusunan data base partai politik
1.19.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.21.06	Pembinaan aliansi LSM
1.19.21.07	Forkomkon bagi fungsionaris parpol, ormas, dan LSM
1.19.21.08	Forum Lintas Partai Politik
1.19.21.09	Fasilitasi bantuan keuangan kepada parpol
1.19.21.12	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu
1.19.21.16	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
1.19.21.17	Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pilbup
1.19.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggngnangan Korban Bencana Alam
1.19.22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

KODE	URAIAN
1.19.22.02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dan ancaman korban bencana alam
1.19.22.03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam
1.19.22.04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
1.19.22.05	Sosialisasi penanggulangan Bencana Alam
1.19.22.06	Peningkatan pelatihan dan gladi lapang ketanggap darurat
1.19.22.07	Peningkatan askes komunikasi dan pengembangan sistem peringatan dini
1.19.22.08	Pendataan dan pemetaan wilayah resiko bencana
1.19.22.10	Penanganan Bencana kekeringan
1.19.22.11	Peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)
1.19.22.12	Penyusunan RAPERDA PB Kabupaten Pacitan
1.19.22.13	Operasional posko penanggulangan bencana
1.19.22.15	Pemulihan dampak bencana
1.19.22.16	Pembentukan desa tangguh bencana
1.19.22.17	Pembentukan relawan
1.19.22.18	Gladi lapang penanggulangan bencana
1.20	PEMERINTAMAN UMUM
1.20.07	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan SDM aparatur
1.20.07.01	Fasilitas pemilihan kepala desa
1.20.07.02	Fasilitas penghargaan kepala mantan kepala desa/aparat desa
1.20.07.03	Fasilitas pembinaan kesejahteraan keluarga
1.20.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
1.20.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20.15.04	Rapat-rapat paripurna
1.20.15.05	Kegiatan Reses
1.20.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
1.20.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.20.15.08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20.15.11	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah
1.20.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan(anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan)
1.20.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
1.20.16.03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
1.20.16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
1.20.16.05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah
1.20.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1.20.16.07	Rumah Tangga Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah

KODE	URAIAN
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.17.01	Penyusunan analisa standar belanja
1.20.17.02	Penyusunan standar satuan harga
1.20.17.03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
1.20.17.04	Penyusunan sistem dan prosedur pengeioloan keuangan daerah
1.20.17.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
1.20.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1.20.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
1.20.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
1.20.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.20.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
1.20.17.12	Penyusunan sistem infonnasi keuangan daerah
1.20.17.13	Penyusunan sistem informasi pengeioloan keuangan daerah
1.20.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengeioloan keuangan daerah
1.20.17.15	Bimbingan teknis implementasi palket regulasi tentang pengeioloan keuangan daerah
1.20.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah
1.20.17.17	Peningkatan manajemen investasi daerah
1.20.17.18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.17.20	Penyusunan dan pengeioloan administrasi pembukuan pembiayaan
1.20.17.21	Koordinasi dan sinkronisasi potensi pendapatan daerah
1.20.17.22	Fasilitasi penyusunan RKA, DPA dan SPD SKPD
1.2017.23	Peningkatan Kinerja Pengeioloan Keuangan Daerah
1.20.17.24	Peningkatan Pengeioloan Perbendaharaan Daerah
1.20.17.26	Evaluasi Pelunasan PBB
1.20.17.27	Penunjang Pelaksanaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah
1.20.17.28	Penertiban Pengelolaan Aset Daerah
1.20.17.29	Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
1.20.17.30	Optimalisasi penerimaan PBB P2
1.20.17.31	Pengembangan sistem informasi PBB P2
1.20.17.32	Operasional penagihan pajak dan retribusi daerah
1.20.17.33	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Non APBD
1.20.17.34	Evaluasi Pengeioloan SPJ Fungsional SKPD
1.20.17.35	Pengeioloan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD
1.20.17.36	Fasilitasi Evaluasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian
1.20.17.37	Inventarisasi aset daerah
1.20.17.38	Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil
1.20.17.39	Sosialisasi Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD
1.20.17.40	Penyusunan Pengeioloan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah
1.20.17.41	Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
1.20.17.42	Pemutakhiran data dan pendampingan PBB P2
1.20.17.43	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
1.20.17.44	Pembinaan Pengeioloan Keuangan Daerah
1.20.17.45	Kalibrasi data, penyusunan klarifikasi tanah dan NJOP
1.20.17.47	Analisa Standar Biaya

KODE	URAIAN
1.20.17.48	Penyusunan Renca Kebutuhan Barang Milik Daerah
1.20.17.50	Pengamanan Aset Daerah
1.20.17.51	Pengeioloan administrasi gaji PNSD
1.20.17.52	Penyusunan profil aset daerah
1.20.17.53	Peningkatan Pengeioloan Benda-benda daerah (Karcis Daerah)
1.20.17.54	Fasilitas pemungutan pajak daerah
1.20.17.55	Fasilitas Penyusunan potensi pendapatan daerah
1.20.17.56	Fasilitasi pelaksanaan dana BK hibah dan bansos
1.20.17.57	Sistem penganggaran terintegrasi
1.20.17.88	Fasilitasi pemungutan pajak daerah
1.20.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeioloan Keuangan Kabupaten/Kota
1.20.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
1.20.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota
1.20.18.03	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
1.20.18.04	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
1.20.18.05	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengeioloan keuangan daerah kabupaten/kota
1.20.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeioloan Keuangan Desa
1.20.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa
1.20.19.02	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
1.20.19.03	Penyusunan pedoman pengeioloan keuangan desa
1.20.19.04	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.20.20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.20.20.04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
1.20.20.05	Inventarisasi temuan pengawasan
1.20.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1.20.20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20.20.10	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
1.20.20.11	Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
1.20.20.12	Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
1.20.20.13	Pembinaan UKS
1.20.20.14	Pelayanan Keprotokolan
1.20.20.15	Penanggulangan NAPZA dan Penyakit Menular Seksual (PMS)
1.20.20.16	Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Program Raskin
1.20.20.17	Fasilitasi seni budaya dan peringatan hari Besar Nasional
1.20.20.18	Koordinasi Penelolaan Kawasan Sumber Air Bersih
1.20.20.19	Sosialisasi Kelestarian Pesisir Pantai
1.20.20.20	Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat
1.20.20.21	Monitoring Bidang Sosial Kemasyarakatan
1.20.20.22	Pembinaan Jasa Konstruksi

KODE	URAIAN
1.20.20.23	Penyampaian Ketentuan dibidang Cukai kepada Masyarakat yang Bertujuan agar Masyarakat Mengetahui, Memahami dan Mematuhi Ketentuan di Bidang Cukai
1.20.20.24	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
1.20.20.25	Pembinaan Drum Band
1.20.20.26	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Pemuda
1.20.20.27	Pembinaan Mental Spiritual
1.20.20.28	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Olah Raga
1.20.20.29	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ
1.20.20.30	Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa
1.20.20.31	Peningkatan Koordinasi Bantuan Keagamaan
1.20.20.32	Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EK-PPD)
1.20.20.33	Monitoring dan Evaluasi Pengeioloan Sumber Daya Alam (SDA)
1.20.20.34	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Organisasi Wanita
1.20.20.35	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ)
1.20.20.36	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
1.20.20.37	Koordinasi dan Fasilitasi Industri Kecil Pedesaan
1.20.20.38	Operasional Bantuan TPAPD, BPD dan RT/RW
1.20.20.39	Peningkatan Stabilitas Harga Sembilan Bahan Pokok
1.20.20.40	Peningkatan Koordinasi Pemasaran Produk Daerah
1.20.20.41	Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Saprodi Pertanian
1.20.20.46	Pembinaan Dai dan Khotib
1.20.20.49	Evaluasi AKIP/LAKIP
1.20.20.50	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
1.20.20.52	Penanganan Ijin Perceraian bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
1.20.20.53	Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.20.20.54	Pengorganisasian, Koordinasi dan Pemanfaatan Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep)
1.20.20.55	Penilaian Sinergitas Kecamatan
1.20.20.56	Peningkatan Pemberdayaan Lansia
1.20.20.57	Monitoring Bantuan Hibah dan Sosial
1.20.20.64	Peningkatan Profesionalisme dan Pemahaman Personil Pelaksana Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
1.20.20.65	Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat
1.20.20.67	Penyusunan Dokumen ISO 9001-2008
1.20.20.68	Sertifikasi ISO 9001-2008
1.20.20.71	Koordinasi pengeioloan geopark gunungsewu geo area Pacitan
1.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20.21.02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
1.20.21.03	Peningkatan Kualitas Pengawas
1.20.21.04	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan
1.20.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20.22.01	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1.20.22.02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1.20.22.03	Dst

KODE	URAIAN
1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.20.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1.20.23.02	Peningkatan Kemudahan Komunikasi Informasi antar SKPD di Kabupaten Pacitan
1.20.23.03	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
1.20.23.04	Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi bagi Masyarakat
1.20.23.05	Penerbitan Tabloid, Majalah, Leaflet dan Bookleaf
1.20.23.06	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1.20.23.07	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
1.20.23.08	Pengembangan Webside Pacitan Kab. Go.Id
1.20.23.09	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Implementasi E-Procurement
1.20.23.10	Penyebarluasan Informasi melalui Siaran Radio
1.20.23.12	Peningkatan Pengeioloan Pelayanan Kasda
1.20.23.13	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) melalui Web Base Reporting System (WBRS) DAK
1.20.23.14	Pemeliharaan Web Site DPPKA.PacitanKab.GO.ID
1.20.23.15	Pengeioloan Data Elektronik
1.20.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.20.24.01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
1.20.24.02	Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus Pengaduan
1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1.20.25.01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
1.20.25.02	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
1.20.25.03	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum
1.20.25.04	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
1.20.25.06	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
1.20.25.07	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga
1.20.25.08	Pengembangan Wilayah Perbatasan
1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
1.20.26.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
1.20.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1.20.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20.26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan
1.20.26.06	Kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap peraturan perundang undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar perundang undangan daerah
1.20.26.07	Penyusunan produk hukum daerah
1.20.26.08	Himpunan Peraturan Perundang-undangan
1.20.26.09	Pertimbangan Hukum, bantuan hukum dan penyelesaian perkara hukum
1.20.26.10	Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum (SJDIH)
1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.27.01	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

KODE	URAIAN
1.20.27.02	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dan daerah induk ke daerah pemekaran
1.20.27.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
1.20.27.04	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
1.20.27.05	Dst
1.20.28	Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SPM
1.20.28.02	Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
1.20.29	Program Penetapan dan Pengendalian Penerapan SOP
1.20.29.05	Peningkatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1.20.30	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa
1.20.30.01	Pemeliharaan Pasar Daerah
1.20.30.02	Penyempurnaan Pasar Daerah
1.20.30.03	Pembinaan dan Evaluasi UFTD Pasar Daerah
1.20.30.05	Pembangunan dan peningkatan pasar daerah
1.20.37	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.20.37.12	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
1.20.38	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.38.02	Seleksi penerimaan calon PNS
1.20.38.17	Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
1.20.38.18	Penyusunan dan Pelaporan Data Kepegawaian
1.20.38.19	Administrasi Mutasi Pegawai
1.20.38.20	Administrasi Pembinaan PNS dan Tenaga Non PNS
1.20.38.21	Pelepasan Purna Tugas dan Pengurnisan Kesejahteraan Pegawai
1.20.38.22	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
1.2038.23	Pengadaan dan Pemeliharaan Kartu Identitas Pegawai
1.20.38.24	Administrasi Kepegawaian
1.20.38.25	Administrasi Pensiun
1.20.38.26	Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
1.20.38.27	Seleksi Penerimaan Praja IPDN
1.20.38.28	Orientasi Persiapan Purna Tugas
1.20.38.29	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.38.30	Pengeiolaan laporan harta jkekayaan penyelenggara negara (LHKPN)
1.20.38.32	Pemeliharaan arsip PNS
1.20.39	Program Kelitbangan
1.20.39.12	fasilitasi tim koordinasi penguatan SIDA kabupaten pacitan
1.20.39.13	penelitian strategi pelunasan akses dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini
1.20.39.14	penelitian pemetaan lokasi pendirian sekolah menengah dalam rangka peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan
1.20.39.15	pengkajian aktual bidang sosial budaya dan kemasyarakatan
1.20.39.16	penelitian pengembangan desa wisata berbasis potensi dan kearifan budaya lokal
1.20.39.17	penelitian strategi peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten pacitan
1.20.39.18	pengkajian aktual bidang pemerintahan dan keuangan daerah
1.20.39.19	penelitian pemetaan investasi di kabupaten pacitan

KODE	URAIAN
1.20.39.20	iptek bagi wilayah
1.20.39.21	aplikasi teknologiperekayasaan pengering jangelan
1.20.39.22	pemeliharaan aplikasi teknologi pengembangan komoditas tanaman durian melalui penetapan sistem sambung pucuk
1.20.39.23	pengkajian aktual bidang ekonomi dan pembangunan
1.20.39.24	penelitian optimalisasi badan usaha milik desa dalam peningkatan pendapatan asli daerah
1.20.39.25	penelitian pengembangan budaya baca bagi peserta didik dan masyarakat umum
1.21	KETAHANAN PANGAN
1.21.15	Program Pendidikan Kedinasan
1.21.15.01	Pendidikan dan pelatihan teknis
1.21.15.02	Pendidikan penjenjangan struktural
1.21.15.03	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
1.21.15.04	Pembuatan buku juknis/juklak
1.21.15.05	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
1.21.15.06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
1.21.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
1.21.16.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.21.16.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1.21.16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1.21.16.04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
1.21.17	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1.21.17.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1.21.17.02	Seleksi penerimaan calon PNS
1.21.17.03	Penempatan PNS
1.21.17.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1.21.17.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1.21.17.06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
1.21.17.07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
1.21.17.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
1.21.17.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1.21.17.10	Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS
1.21.17.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1.21.17.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
1.21.17.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
1.21.17.14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
1.21.17.15	monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.21.17.16	Koordinasi penyelenggaraan diklat
1.22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.22.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.22.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
1.22.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

KODE	URAIAN
1.22.15.04	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
1.22.15.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan
1.22.15.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Desa
1.22.15.11	Penguatan Pokjamal Posyandu
1.22.15.16	Tilik Warga Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
1.22.15.17	Optimalisasi Pokja pengaduan masyarakat TKPK
1.22.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1.22.16.01	Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman
1.22.16.02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
1.22.16.03	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
1.22.16.04	Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan
1.22.16.05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
1.22.16.06	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
1.22.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22.16.08	Fasilitasi dan Stimulasi Pendirian BUMDES
1.22.16.09	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)
1.22.16.11	Penerapan TTG dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional
1.22.16.14	Pelatihan manajemen pasar desa
1.22.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1.22.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1.22.17.08	Pemberian stimulan pembangunan desa
1.22.17.04	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
1.22.17.05	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
1.22.17.06	Penguatan Kelembagaan Posyandu
1.22.17.07	Pelatihan Calon Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.22.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
1.22.18.01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
1.22.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
1.22.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
1.22.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22.18.05	Peningkatan sumber daya manusia pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
1.22.18.06	Perlombaan Desa dan Penilaian Pengelolaan APBDes Terbaik
1.22.18.07	Pendataan Profil Desa/Kelurahan
1.22.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
1.22.19.01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
1.22.19.02	TP-PKK dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

KODE	URAIAN
1.23	STATISTIK
1.23.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.23.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.23.15.02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
1.23.15.03	Penyusunan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
1.23.15.04	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
1.23.15.06	Penyusunan data perkembangan ekonomi kabupaten pacitan
1.23.15.07	Penyusunan profil statistik kabupaten dan kecamatan
1.24	KEARSIPAN
1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1.24.15.01	Pembangunan data base informasi kearsipan
1.24.15.02	Pengumpulan data
1.24.15.03	Pengklasifikasian data
1.24.15.04	Penyusunan sistem katalog data
1.24.15.05	Pengadaan sarana penyimpanan
1.24.15.06	Kajian sistem administrasi kearsipan
1.24.15.07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
1.24.15.08	Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan
1.24.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1.24.16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1.24.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1.24.16.03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
1.24.16.04	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
1.24.16.05	Dst
1.24.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1.24.17.01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1.24.17.02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
1.24.17.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
1.24.17.04	Dst
1.24.18	Program peningkatan kualitas pelayanan Informasi
1.24.18.01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
1.24.18.02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip
1.24.18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
1.24.18.04	Dst
1.25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25.15.01	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
1.25.15.01	Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi
1.25.15.02	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1.25.15.03	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
1.25.15.04	Pengadaan alat studio dan komunikasi

KODE	URAIAN
1.25.15.05	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.25.15.06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.25.15.07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
1.25.15.10	Pembinaan Jasa Titipan dan Telekomunikasi
1.25.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1.25.16.01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1.25.16.02	Dst
1.25.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi
1.25.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1.25.17.02	Dst
1.25.18	Program kerjasama informasi dengan mas media
1.25.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1.25.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.25.18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
1.26	PERPUSTAKAAN
1.26.15	Program Penyuluhan Pelayanan Perpustakaan
1.26.15.01	Pelayanan Perpustakaan Umum
1.26.15.02	Perpustakaan Keliling
2.01	PERTANIAN
2.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.15.01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (Cukai)
2.01.15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
2.01.15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.01.15.04	Peningkatan Sistem Insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani
2.01.15.05	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur
2.01.15.06	Program Anti Poverty Program (APP)
2.01.15.07	Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan (DAK)
2.01.15.14	Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri penghasil
2.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2.01.16.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan
2.01.16.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan
2.01.16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
2.01.16.04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
2.01.16.05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
2.01.16.06	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
2.01.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
2.01.16.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
2.01.16.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
2.01.16.10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

KODE	URAIAN
2.01.16.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
2.01.16.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
2.01.16.13	Pengembangan cadangan Pangan Daerah
2.01.16.14	Pengembangan desa mandiri pangan
2.01.16.15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
2.01.16.16	Pengembangan diversifikasi tanaman
2.01.16.17	Pengembangan pertanian pada lahan kering
2.01.16.18	Pengembangan lumbung pangan desa
2.01.16.19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
2.01.16.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan
2.01.16.21	Pengembangan sistem informasi pasar
2.01.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.01.16.23	Koordinasi kebijakan perberasan
2.01.16.24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
2.01.16.25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
2.01.16.26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
2.01.16.27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
2.01.16.28	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
2.01.16.29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
2.01.16.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif
2.01.16.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.16.36	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
2.01.16.38	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
2.01.16.39	Pembangunan gedung cadangan pangan pemerintah dan penyediaan sarana pendukung
2.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.17.01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.17.02	Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/interuasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer
2.01.17.03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
2.01.17.04	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.17.05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
2.01.17.06	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
2.01.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
2.01.17.08	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon
2.01.17.09	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
2.01.17.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
2.01.17.11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
2.01.17.12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
2.01.17.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.17.14	Dst

KODE	URAIAN
2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
2.01.18.01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK)
2.01.18.03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.18.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.18.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.18.06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
2.01.18.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.18.08	Sharing TP Sosialisasi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP)
2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.01.19.01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2.01.19.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01.19.04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01.19.05	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
2.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.19.07	Pengembangan Tanaman Nilam Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)
2.01.19.08	Peremajaan, Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
2.01.19.09	Optimalisasi dan pengembangan sumber daya sarana prasarana pengendalian OPT
2.01.19.10	Intensifikasi tanaman perkebunan
2.01.19.11	Pengembangan Agensia Hayati
2.01.19.12	Bimbingan teknis pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT
2.01.19.13	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku (DBHCT)
2.01.19.14	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi Daerah dilaksanakan antara lain melalui Bantuan sarana produksi tanaman perkebunan
2.01.19.17	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2.01.19.20	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)
2.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
2.01.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.01.20.02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
2.01.20.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
2.01.20.06	Pembangunan pupuk organik
2.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2.01.21.01	Pendataan masalah peternakan
2.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2.01.21.03	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
2.01.21.04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
2.01.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
2.01.22.02	Pembibitan dan perawatan ternak

KODE	URAIAN
2.01.22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2.01.22.04	Penyuluhan pengeiolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
2.01.22.05	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
2.01.22.06	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
2.01.22.07	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
2.01.22.08	Pengembangan agribisnis peternakan
2.01.22.09	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan
2.01.22.13	Pengembangan Inseminasi Buatan
2.01.22.14	Peningkatan pengawasan bahan asal hewan (BAH) yang ASUH
2.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2.01.23.01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
2.01.23.02	Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/intemasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer
2.01.23.03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
2.01.23.04	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan
2.01.23.05	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2.01.23.06	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
2.01.23.07	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
2.01.23.08	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
2.01.23.09	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
2.01.23.10	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan
2.01.23.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.23.12	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2.01.23.13	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
2.01.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
2.01.24.01	Penelitian dan pengembangan teknobgi peternakan tepat guna
2.01.24.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2.01.24.03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
2.01.24.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
2.01.24.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
2.01.24.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.24.07	Optimalisasi budidaya ternak
2.02	KEHUTANAN
2.02.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2.02.15.01	Pembentukan kesatuan pengeiolaan hutan produksi
2.02.15.02	Pengembangan hutan tanaman
2.02.15.03	Pengembangan hasil hutan non-kayu
2.02.15.04	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
2.02.15.05	Optimalisasi PNBP
2.02.15.06	Pengeiolaan dan pemanfaatan hutan
2.02.15.07	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
2.02.15.08	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

KODE	URAIAN
2.02.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.02.15.10	Dst
2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.16.01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
2.02.16.02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2.02.16.03	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
2.02.16.04	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
2.02.16.05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.16.06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.02.16.08	Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK)
2.02.16.09	Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan (DAK)
2.02.16.10	Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Sipil Teknis (DPn,Dpi,Sumur Resapan)
2.02.16.11	Penyusunan rencana kehutanan tingkat Kabupaten (RKTK)
2.02.17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
2.02.17.01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2.02.17.02	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
2.02.17.03	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2.02.17.04	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2.02.17.05	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
2.02.17.06	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK)
2.02.17.08	Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Sumber Mata Air
2.02.18	Program pemanfaatan kawasan hutan industri
2.02.18.01	Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah
2.02.18.02	Dst
2.02.19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
2.02.19.01	Penyusunan peraturan daerah mengenai pengeioloan industri hasil hutan
2.02.19.02	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengeioloan industri hasil hutan
2.02.19.03	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengeioloan industri hasil hutan
2.02.19.04	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
2.02.19.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.02.19.06	Pembinaan Tata Peredaran Hasil Hutan (TPHH)
2.02.20	Program perencanaan dan pengembangan hutan
2.02.20.01	Pengembangan hutan masyarakat adat
2.02.20.02	Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
2.02.20.03	Dst
2.02.21	Program Dst

KODE	URAIAN
2.03	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.03.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2.03.15.01	Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2.03.15.02	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
2.03.15.03	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
2.03.15.04	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
2.03.15.05	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C
2.03.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.03.15.09	penyusunan sistem informasi pertambangan
2.03.15.10	pemetaan rawan gerakan tanah
2.03.15.11	pemetaan potensi air tanah
2.03.15.12	pembinaan pengeioloan potensi tambang dan tata cara penambangan
2.03.16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
2.03.16.01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
2.03.16.02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat
2.03.16.03	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
2.03.16.06	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
2.03.16.08	pengembangan kawasan geopark
2.03.16.09	pengawasan dan penertiban kegiatan usaha pertambangan
2.03.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
2.03.17.01	Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
2.03.17.02	Pengembangan jaringan listrik di dusun dan daerah terpencil
2.03.17.07	Pengembangan energi perdesaan
2.04	PARIWISATA
2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.04.15.01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
2.04.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
2.04.15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
2.04.15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2.04.15.05	Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
2.04.15.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
2.04.15.07	Pengembangan Statistik Kepariwisataan
2.04.15.08	Pelatihan pemandu wisata terpadu
2.04.15.11	Pemilihan/Seleksi dan Pembinaan Kethuk Kenang/Raka Rald dan Duta Wisata Daerah
2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2.04.16.03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
2.04.16.04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

KODE	URAIAN
2.04.16.05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
2.04.16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata
2.04.16.07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
2.04.16.12	Penyusunan dokumen naskah akademis RIPDA
2.04.17	Program Pengembangan Kemitraan
2.04.17.01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database
2.04.17.02	Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
2.04.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
2.04.17.04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
2.04.17.05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
2.04.17.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
2.04.17.07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
2.04.17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
2.04.17.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.04.17.10	Dst
2.05	KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2.05.15.01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
2.05.15.04	Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan penetapan dan sosialisasi perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
2.05.15.09	penguatan kelembagaan KUB perikanan tangkap
2.05.15.10	penguatan kelembagaan KUB perikanan tangkap
2.05.15.11	pendampingan program sertifikasi hak atas tanah nelayan
2.05.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya lautan
2.05.16.01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
2.05.16.02	Pengawasan Keamanan Laut Terpadu
2.05.16.09	rehabilitasi mangrove ,terumbu karang dan lamun
2.05.16.10	pengembangan sarana dan prasarana pengawasan (DAK)
2.05.16.11	pengembangan sarana dan prasarana konservasi (DAK)
2.05.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
2.05.17.01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
2.05.17.02	Dst
2.05.18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2.05.18.01	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
2.05.18.02	Dst

KODE	URAIAN
2.05.19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
2.05.19.01	Penyuluhan budaya kelautan
2.05.19.02	Dst
2.05.20	Program pengembangan budidaya perikanan
2.05.20.01	Pengembangan bibit ikan unggul
2.05.20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2.05.20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05.20.13	pengembangan prasarana budidaya ikan
2.05.20.18	optimalisasi budidaya perikanan (DAK)
2.05.20.20	Pembinaan dan pengembangan perikanan
2.05.21	Program pengembangan perikanan tangkap
2.05.21.01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2.05.21.02	Pembangunan tempat pelelangan ikan
2.05.21.03	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
2.05.21.04	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
2.05.21.05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
2.05.21.06	Peningkatan sarana dan prasarana pendaratan ikan (DAK)
2.05.21.07	Pengembangan sarana perikanan tangkap (DAK)
2.05.21.08	Restocking ikan dan pembinaan kelompok di perairan umum
2.05.21.09	Penguatan kelembagaan KUB penerima bantuan kapal Inka Mina
2.05.21.10	Fasilitasi mina politan perikanan tangkap
2.05.22	Program pengembangan sistem penyulunkan perikanan
2.05.22.01	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Penyuluh (DAK)
2.05.22.02	Legalisasi usaha perikanan
2.05.22.05	Optimalisasi kelembagaan pelaku usaha
2.05.22.27	pelatihan pengelolaan iakan
2.05.22.28	bimbingan teknis pelaku utama perikanan
2.05.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2.05.23.01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2.05.23.04	Promosi Produk Unggulan Perikanan
2.05.23.12	pengendalian mutu hasil perikanan
2.05.23.13	peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan (DAK)
2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2.05.24.01	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
2.05.24.02	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar
2.05.24.03	Anti Poverty Program (APP) Bidang Perikanan
2.05.24.10	optimalisasi sarana dan prasana tambak (DAK)
2.05.24.11	budidaya ikan di keramba (DAK)
2.05.25	Program Dst

KODE 2.06	URAIAN PERDAGANGAN
2.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06.15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2.06.15.02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
2.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.06.15.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah
2.06.15.05	Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP
2.06.15.07	pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran
2.06.16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
2.06.16.01	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
2.06.16.02	Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa
2.06.16.03	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
2.06.16.04	Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
2.06.16.05	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
2.06.16.06	Dst
2.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.06.17.01	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
2.06.17.02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
2.06.17.03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
2.06.17.04	Pengembangan data base informasi potensi unggulan
2.06.17.05	Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan internasional
2.06.17.06	Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
2.06.17.07	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
2.06.17.08	Membangun jejaring dengan eksportir
2.06.17.09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha
2.06.17.10	Pengembangan Kluster produk ekspor
2.06.17.11	Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
2.06.17.12	Pembangunan promosi perdagangan internasional
2.06.17.13	Dst
2.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.06.18.01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
2.06.18.02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
2.06.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
2.06.18.04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
2.06.18.05	Pengembangan pasar lelang daerah
2.06.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
2.06.18.07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
2.06.18.12	Revitalisasi Pasar Daerah (DAK)
2.06.19	Program pembinaan pedagang kakl lima dan asongan
2.06.19.01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

KODE	URAIAN
2.06.19.02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
2.06.19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
2.06.19.04	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
2.06.19.05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan,
2.06.19.06	Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan
2.06.19.07	Dst
2.06.20	Program Dst
2.07	PERINDUSTRIAN
2.07.15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2.07.15.01	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
2.07.15.02	Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator
2.07.15.03	Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi
2.07.15.04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas
2.07.15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
2.07.15.06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
2.07.15.07	Dst
2.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07.16.01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
2.07.16.02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
2.07.16.03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
2.07.16.04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2.07.16.05	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
2.07.16.06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
2.07.16.16	Pelatihan Alih Profesi dan Bantuan Peralatan Bagi Industri Kecil Menengah di Sekitar Industri Rokok
2.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2.07.17.01	Pembinaan kemampuan teknologi industri
2.07.17.02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2.07.17.03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
2.07.17.04	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
2.07.17.05	Dst
2.07.18	Program Penataan Struktur Industri
2.07.18.01	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
2.07.18.02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
2.07.18.03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
2.07.18.04	Dst
2.07.19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
2.07.19.01	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial

KODE	URAIAN
2.07.19.02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
2.07.19.03	Peningkatan Produk Batu Mulia Menuju Terbentuknya Cluster (Dampingan APBN)
2.07.19.04	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau melalui Peningkatan SDM bagi Pelaku Industri Kecil Menengah
2.07.19.05	Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi bagi IKM
2.07.20	Program Dst
2.08	TRANSMIGRASI
2.08.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2.08.15.01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi perbatasan
2.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
2.08.15.03	Penyediaan dan pengeioloan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
2.08.15.04	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi
2.08.15.05	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
2.08.16	Program Transmigrasi lokal
2.08.16.01	Penyuluhan transmigrasi lokal
2.08.16.02	Pelatihan transmigrasi lokal
2.08.16.03	Dst
2.08.17	Program Transmigrasi regional
2.08.17.01	Penyuluhan transmigrasi regional
2.08.17.02	Pelatihan transmigrasi regional
2.08.17.03	Dst
2.08.18	Program Dst

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 15 TAHUN 2015****TANGGAL : 20 - 5 - 2015****KODE REKENING PENDAPATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

KODE	URAIAN
4	PENDAPATAN DAERAH
4.1	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah
4.1.1.01	Pajak Hotel
4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima Berlian
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu
4.1.1.01.10	Motel
4.1.1.01.11	Cottage
4.1.1.01.12	Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggrahan / Rumah Kos
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata
4.1.1.01.14	Gubuk Pariwisata
4.1.1.01.15	Dst.....
4.1.1.02	Pajak Restoran
4.1.1.02.01	Restoran
4.1.1.02.02	Rumah makan
4.1.1.02.03	Kafetaria
4.1.1.02.04	Kantin
4.1.1.02.05	Katering
4.1.1.02.06	Warung
4.1.1.02.07	Bar
4.1.1.02.08	Jasa Boga
4.1.1.02.09	Dst.....
4.1.1.03	Pajak Hiburan
4.1.1.03.01	Tontonan Film/bioskop
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan
4.1.1.03.04	Kontes Binaraga
4.1.1.03.05	Pameran
4.1.1.03.06	Diskotik
4.1.1.03.07	Karaoke
4.1.1.03.08	Klab Malam
4.1.1.03.09	Sirkus / Akrobat / Sulap

KODE	URAIAN
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar
4.1.1.03.11	Permainan Golf
4.1.1.03.12	Permainan Bowling
4.1.1.03.13	Pacuan Kuda
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.16	Panti pijat / Refleksi
4.1.1.03.17	Mandi Uap / Spa
4.1.1.03.18	Pusat Kegugaran
4.1.1.03.19	Pertandingan Olah raga
4.1.1.03.20	Dst.....
4.1.1.04	Pajak Reklame
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron
4.1.1.04.02	Reklame Kain
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan
4.1.1.04.06	Reklame Udara
4.1.1.04.07	Reklame Apung
4.1.1.04.08	Reklame Suara
4.1.1.04.09	Reklame Film/Slide
4.1.1.04.10	Reklame Peragaan
4.1.1.04.11	Dst.....
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN
4.1.1.05.02	Dst
4.1.1.07	Pajak Parkir
4.1.1.07.01	Pajak Parkir
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.1.11.01	Ashes
4.1.1.11.02	Batu Tulis
4.1.1.11.03	Batu Setengah Permata
4.1.1.11.04	Batu Kapur
4.1.1.11.05	Batu Apung
4.1.1.11.06	Pajak Mineral Bukan Logam
4.1.1.11.07	Pajak Batuan (non sirtu)
4.1.1.11.08	Pajak Batuan (sirtu)
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

KODE	URAIAN
4.1.1.13	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.1.13.01	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.2	BASIL RETRIBUSI DAERAH
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.1.2.01.06	Retribusi pelayanan pasar
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus
4.1.2.01.12	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.2.01.14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.2.01.15	Dst.....
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02 .01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.2.02 .02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4.1.2.02 .03	Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.02 .04	Retribusi Terminal
4.1.2.02 .05	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.02 .06	Retribusi Tempat Penginapan/Villa/Pesanggrahan
4.1.2.02 .08	Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.2.02 .09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.2.02 .10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.1.2.02 .11	Retribusi Penyeberangan di Air
4.1.2.02 .13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.02 .14	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan & IB
4.1.2.02 .15	Retribusi pengeioloan Sarang Burung Walet dan yang sejenisnya
4.1.2.02 .16	Retribusi Pengeioloan Pengambilan Rumput Laut
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4.1.2.03.06	Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan
4.1.2.03.07	Retribusi Izin Usaha Jasa Kostruksi
4.1.2.03.08	Retribusi Izin Tebang Kayu Milik / Hutan Rakyat
4.1.2.03.09	Retribusi Izin Usaha Perdagangan
4.1.2.03.10	Retribusi Tanda Daftar Penisahaan
4.1.2.03.11	Retribusi Izin Usaha Industri
4.1.2.03.12	Retribusi Tanda Daftar Industri

KODE	URAIAN
4.1.2.03.13	Retribusi Tanda Daftar Gudang
4.1.2.03.14	Retribusi Pemanfaatan Air Bawah Tanah
4.1.2.03.15	Retribusi Kuasa Pertambangan Pengolahan & Pemurnian
4.1.2.03.16	Retribusi Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Gol. C
4.1.2.03.17	Retribusi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Gol.AB
4.1.2.03.18	Kuasa Pertambangan Eksploitasi Gol.AB
4.1.2.03.19	Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD
4.1.3.01.01	Bank Jatim
4.1.3.01.02	Bank Perkreditan Rakyat
4.1.3.01.03	Perusahaan Daerah Air Minum
4.1.3.01.04	Perusahaan Daerah Batu Alam
4.1.3.01.05	UBIBAM
4.1.3.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan Milik NEGARA / BUMN
4.1.3.02.01	BUMN
4.1.3.02.02	Dst
4.1.3.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan milik Swasta
4.1.3.03.01	Apotik KPRI Among Husodo RSD
4.1.3.03.02	Dana Bergulir Koperasi
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak di Pisahkan
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas
4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4.1.4.01.09	Penjualan Lampu Hias Bekas
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
4.1.4.01.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4.1.4.01.12	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian
4.1.4.01.14	Penjualan Hasil Kehutanan
4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peteruakan
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan
4.1.4.01.18	Penjualan Hasil Sitaan
4.1.4.01.19	Penjualan Pos Direksi
4.1.4.02	Jasa Giro
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas

KODE	URAIAN
4.1.4.02.03	Jasa Giro Dana Cadangan
4.1.4.02.04	Jasa Giro Bendahara Pengeluaran SKPD
4.1.4.03	Pendapatan Bunga
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada BPD
4.1.4.03.02	Rekening Deposito pada BRI
4.1.4.03.03	Rekening Deposito pada BNI
4.1.4.03.04	Pendapatan Bunga Piutang
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah
4.1.4.04.02	Kerugian Barang Daerah
4.1.4.04.03	Dst
4.1.4.05	Komis, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.05.01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah
4.1.4.05.02	Penerimaan Potongan dari
4.1.4.05.03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari
4.1.4.05.04	Dst
4.1.4.06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan
4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup
4.1.4.06.09	Bidang Pertanahan
4.1.4.06.10	Dst
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu

KODE	URAIAN
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4.1.4.09.01	Pendapatan Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.09.02	Pendapatan Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4.1.4.09.03	Pendapatan Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.10.01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.4.10.02	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
4.1.4.10.04	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas
4.1.4.10.05	Pendapatan dari Pengembalian dari uang muka
4.1.4.10.06	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran belanja selain gaji dan tunjangan
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Ilmiah
4.1.4.11.01	Fasilitas Sosial
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum
4.1.4.11.02	Dst
4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4.1.4.12.01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4.1.4.12.02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan
4.1.4.12.03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas
4.1.4.12.04	Dst
4.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4.1.4.13.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
4.1.4.13.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4.1.4.13.03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4.1.4.14.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
4.1.4.15	Pendapatan dari BLUD
4.1.4.15.01	Pendapatan dari BLUD
4.1.4.16	Pendapatan Lain-Lain
4.1.4.16.01	Pendapatan Lain-Lain
4.2	<u>DANA PERIMBAHAGAN</u>
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan / PBB
4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan / BPHTB
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4.2.1.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan

KODE	URAIAN
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.1.02.11	Dst
4.2.2	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum
4.2.3	Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus
<u>4.3</u>	<u>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</u>
4.3.1	Pendapatan Hibah
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.01.01	Pemerintah
4.3.1.01.02	Dst.
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah.....
4.3.1.02.02	Dst
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4.3.1.03.01	PT.DWI KARYA BANGKIT SEJAHTERA
4.3.1.03.02	Dst
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4.3.1.04.01	Kelompok Masyarakat / Perorangan
4.3.1.04.02	Dst
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4.3.1.05.04	Dst
4.3.2	Dana Darurat
4.3.2.01	Penanggulangan Korban / Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.01.01	Korban/ Kerusakan akibat bencana alam
4.3.2.01.02	Dst

KODE	URAIAN
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.02.02	Dst
4.3.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4.3.3.03.02	Dst
4.3.3.04	Dana Bagi Hasil dari Kota
4.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4.3.3.04.02	Dst
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.01	Dana Penyesuaian
4.3.4.01.01	Dana BOS
4.3.4.01.02	Dana Penyesuaian
4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.02.02	Dst
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.5.01	Bantuan Kenangan dari Provinsi
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi
4.3.5.01.02	Dst
4.3.5.02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4.3.5.02.02	Dst
4.3.5.03	Bantuan Kenangan dari Kota
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan dari Kota
4.3.5.02.02	Dst

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 - 5 - 2015

**KODE REKENING BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

5.1	BELANJA DAERAH
5.1.1	<u>Belanja Tidak Langsung</u>
5.1.1.01	Belanja Pegawai
5.1.1.01.01	Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
5.1.1.01.01.02	Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.01.03	Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.01.04	Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.01.05	Tunjangan Umum
5.1.1.01.01.06	Tunjangan Beras
5.1.1.01.01.07	Tunjangan PPh
5.1.1.01.01.08	Pembulatan Gaji
5.1.1.01.01.09	Uang Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.01.10	Uang Paket
5.1.1.01.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah
5.1.1.01.01.12	Tunjangan Komisi
5.1.1.01.01.13	Tunjangan Badan Anggaran
5.1.1.01.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan
5.1.1.01.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.1.1.01.01.16	Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.01.17	Uang Duka Wafat / Tewas
5.1.1.01.01.18	Uang Jasa Pengabdian
5.1.1.01.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.01.01.20	Tunjangan Profesi Guru
5.1.1.01.01.21	Dst
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5.1.1.02.06	Belanja Sertifikasi
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5.1.1.03.03	Dst
5.1.1.04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB

KODE	URAIAN
5.1.1.04.03	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05	Intensif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.01	Intensif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.06	Intensif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.01	Intensif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.2	Belanja Bunga
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.1.2.01.05	Dst.....
5.1.2.02	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.01	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.02	Dst.....
5.1.3	Belanja Subsidi
5.1.3.01	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan / Lembaga
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan.....
5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada Lembaga
5.1.3.01.03	Dst.....
5.1.4	Belanja Hibah
5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat
5.1.4.02	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5.1.4.02.01	Pemerintah Daerah.....
5.1.4.02.02	Dst.....
5.1.4.03	Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.4.03.01	Pemerintahan Desa
5.1.4.03.02	Dst.....
5.1.4.04	Belanja Hibah kepada Perusahaan / BUHD /BUMN
5.1.4.04.01	Perusahaan Daerah BUMD / BUMN
5.1.4.04.02	Dst
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta
5.1.4.05.01	Badan / Lembaga / Organisasi swasta
5.1.4.06	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan
5.1.4.06.01	Kelompok Masyarakat/Perorangan
5.1.4.06.02	Dst
5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS
5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta

KODE	UJRAIAN
5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
5.1.5.02.01	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat
5.1.5.02.02	Dst
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
5.1.5.03.02	Dst
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
5.1.6.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5.1.6.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...
5.1.6.01.02	Dst
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten / Kota
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ...
5.1.6.02.02	Dst
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.03.03	Dst
5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.04.02	Dst
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
5.1.6.05.02	Dst
5.1.6.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi
5.1.6.06.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7.01.02	Dst
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota
5.1.7.02.02	Dst
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

KODE	URAIAN
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah / Pemerintahan Desa Lainnya
5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.....
5.1.7.04.04	Dst
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.8	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga
5.2	Belanja Langsung
5.2.1	Belanja Pegawai
5.2.1.01	Honorarium PNS
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.04	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah
5.2.1.01.06	Honorarium Jasa Intensifikasi Pendapatan
5.2.1.02	Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian
5.2.1.02.04	Upah Tenaga Borongan
5.2.1.02.05	Dst
5.2.1.03	Uang Lembur
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS
5.2.1.03.03	Dst
5.2.1.04	Jasa Pemungutan
5.2.1.04.01	Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB
5.2.1.06	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD
5.2.1.06.01	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD
5.2.1.07	Jasa Hedis/Paramedis
5.2.1.07.01	Jasa Medis/Paramedis
5.2.1.07.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

KODE	URAIAN
5.2.2	BELANJA BARANG dan JASA
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
5.2.2.01.12	Belanja Obat-obatan
5.2.2.02	Belanja Bahan / Material
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia
5.2.2.02.06	Belanja tropy/piagam/hadiah
5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak
5.2.2.02.08	Belanja bahan pupuk
5.2.2.02.09	Belanja bibit ikan dan pakan
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Baku Perikanan
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan
5.2.2.02.12	Belanja Bahan Baku Industri
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Praktik/Peraga/Pelatihan/Diklat
5.2.2.02.15	Belanja Induk Ikan
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01	Belanja telepon
5.2.2.03.02	Belanja Air
5.2.2.03.03	Belanja Listrik
5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/internet
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.08	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.10	Belanja jasa pemungutan pajak daerah dan PBB
5.2.2.03.11	Belanja jasa administrasi penyelesaian perkara
5.2.2.03.12	Belanja Software
5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Layanan Kesehatan
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Notaris/Pembuat Akta Tanah
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media
5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi
5.2.2.03.18	Jasa Laundry
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/Paramedis
5.2.2.03.20	Belanja Transportasi

KODE	URAIAN
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Teknis
5.2.2.03.25	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga
5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat
5.2.2.03.27	Uang untuk diberikan kepada siswa/pelajar
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.04.03	Dst
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.06	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5.2.2.05.07	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01	Belanja Cetak
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03	Dst
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
5.2.2.07.04	Belanja Sewa tempat parkir / uang tambat/ hanggar sarana mobilitas
5.2.2.07.05	Dst.....
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.08.04	Dst.....
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser
5.2.2.09.03	Dst.....
5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional

KODE	URAIAN
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem
5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung
5.2.2.10.09	Belanja sewa dekorasi dan perlengkapannya
5.2.2.10.10	Belanja sewa genset
5.2.2.10.11	Belanja sewa alat ukur
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta
5.2.2.11.07	Belanja Makan Minum Kegiatan
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5.2.2.13.02	Dst
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian adat daerah
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga
5.2.2.14.05	Dst
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.04	Belanja Transportasi
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.2.16.01	Belanja Beasiswa tugas belajar D3
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa tugas belajar S1
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa tugas belajar S2
5.2.2.16.04	Belanja Beasiswa tugas belajar S3
5.2.2.16.05	Dst
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01	Belanja Kursus -kursus singkat/ pelatihan
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.04	Dst

KODE	URAIAN
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
5.2.2.18.02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
5.2.2.18.03	Dst
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai
5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
5.2.2.19.02	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Luar Daerah
5.2.2.19.03	Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam melaksanakan tugas
5.2.2.19.04	Dst
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Drainase
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Taman
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Situs Purbakala
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Pengawasan
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis
5.2.2.22	Belanja Operasional Sekolah (BOS)
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
25.2.2.23.01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat
25.2.2.23.02	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
25.2.2.23.03	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Siswa
5.2.2.24	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.24.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5.2.2.24.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.25	Belanja Barang/Jasa BLUD
5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
5.2.2.25.02	Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.2.2.25.04	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.2.2.26	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.2.2.26.01	Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.2.2.26.02	Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga KDH dan
5.2.2.26.03	Wakil KDH
5.2.2.26.04	Belanja Sarana dan Prasarana KDH dan Wakil KDH

KODE	URAIAN
5.2.2.27	Belanja Kompensasi
5.2.2.27.01	Belanja Kompensasi Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum
5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi
5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.3	Belanja Modal
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah kantor
5.2.3.01.02	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan rumah sakit
5.2.3.01.03	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan pukesmas
5.2.3.01.04	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan poliklinik
5.2.3.01.05	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan taman kanak - kanak
5.2.3.01.06	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5.2.3.01.07	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5.2.3.01.08	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5.2.3.01.09	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan luar biasa
5.2.3.01.10	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5.2.3.01.11	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana sosial panti asuhan
5.2.3.01.12	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana sosial panti jompo
5.2.3.01.13	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum terminal
5.2.3.01.14	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum dermaga
5.2.3.01.15	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5.2.3.01.16	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum rumah potong hewan
5.2.3.01.17	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5.2.3.01.18	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum pasar
5.2.3.01.19	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5.2.3.01.20	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum taman
5.2.3.01.21	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5.2.3.01.22	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum ibadah
5.2.3.01.23	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana umum stadion olah raga
5.2.3.01.24	Belanja Modal Pengadaan Tanah perumahan
5.2.3.01.25	Belanja Modal Pengadaan Tanah pertanian
5.2.3.01.26	Belanja Modal Pengadaan Tanah perkebunan
5.2.3.01.27	Belanja Modal Pengadaan Tanah perikanan
5.2.3.01.28	Belanja Modal Pengadaan Tanah peternakan
5.2.3.01.29	Belanja Modal Pengadaan Tanah perkampungan
5.2.3.01.30	Belanja Modal Pengadaan Tanah pergudangan / tempat penimbunan material
5.2.3.01.31	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk penanggulangan banjir
5.2.3.01.32	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Irigasi
5.2.3.01.33	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Jalan
5.2.3.01.34	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Situs Purbakala
5.2.3.01.35	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Tugu Batas Kota
5.2.3.01.36	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Air Bersih
5.2.3.01.37	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Pariwisata

KODE	URAIAN
5.2.3.01.38	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Kompensasi Lahan
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat
5.2.3.02.01	Belanja Modal Pengadaan traktor
5.2.3.02.02	Belanja Modal Pengadaan buldozer
5.2.3.02.03	Belanja Modal Pengadaan stomm wals
5.2.3.02.04	Belanja Modal Pengadaan esvakator
5.2.3.02.05	Belanja Modal Pengadaan drum truk
5.2.3.02.06	Belanja Modal Pengadaan crane
5.2.3.02.07	Belanja Modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
5.2.3.02.08	Belanja Modal Pengadaan mesin pengolah semen
5.2.3.02.09	Belanja Modal Pengadaan mesin pengolah air bersih
5.2.3.02.10	Belanja Modal alat -alat bantu
5.2.3.02.11	Belanja Modal Pengadaan Kontainer
5.2.3.02.12	Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sedan
5.2.3.03.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor jeep
5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor station wagon
5.2.3.03.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor bus
5.2.3.03.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor mikro bus
5.2.3.03.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor truck
5.2.3.03.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor tangki (air,minyak,tinja)
5.2.3.03.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor boks
5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor pick up
5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor ambulans
5.2.3.03.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor pemadam kebakaran
5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
5.2.3.03.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor lift / elevator
5.2.3.03.14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor tangga bejalan
5.2.3.03.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor roda tiga
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.02	Belanja Modal Pengadaan pedati / delman / dokar / bendi / cidomo / andong
5.2.3.04.03	Belanja Modal Pengadaan becak
5.2.3.04.04	Belanja Modal Pengadaan sepeda
5.2.3.04.05	Belanja Modal Pengadaan karavan
5.2.3.04.06	Dst.....
5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan diatas Air Bermotor
5.2.3.05.01	Belanja Modal Pengadaan kapal motor

KODE	URAIAN
5.2.3.05.02	Belanja Modal Pengadaan kapal feri
5.2.3.05.03	Belanja Modal Pengadaan speed boat
5.2.3.05.04	Belanja Modal Pengadaan motor boat/motor tempel
5.2.3.05.05	Belanja Modal Pengadaan hydro foil
5.2.3.05.06	Belanja Modal Pengadaan jet foil
5.2.3.05.07	Belanja Modal Pengadaan kapal tug boat
5.2.3.05.08	Belanja Modal Pengadaan kapal tanker
5.2.3.05.09	Belanja Modal Pengadaan kapal kargo
5.2.3.05.10	Dst.....
5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan diatas Air Tidak Bermotor
5.2.3.06.01	Belanja Modal Pengadaan Perahu Layar
5.2.3.06.02	Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan
5.2.3.06.03	Belanja Modal Pengadaan Perahu Tongkang
5.2.3.06.04	Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet
5.2.3.06.05	Belanja Modal Pengadaan Perahu Rakit
5.2.3.06.06	Belanja Modal Pengadaan Perahu Sekoci
5.2.3.06.07	Dst.....
5.2.3.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.07.01	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Kargo
5.2.3.07.02	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Penumpang
5.2.3.07.03	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Helikopter
5.2.3.07.04	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Pemadam Kebakaran
5.2.3.07.05	Belanja Modal Pengadaan Pesawat capung
5.2.3.07.06	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Ampibi
5.2.3.07.07	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Layang
5.2.3.07.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan mesin las
5.2.3.08.02	Belanja Modal Pengadaan mesin bubut
5.2.3.08.03	Belanja Modal Pengadaan mesin dongkrak
5.2.3.08.04	Belanja Modal Pengadaan mesin kompresor
5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Genset
5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
5.2.3.08.07	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09.01	Belanja Modal Pengadaan penggilingan hasil pertanian
5.2.3.09.02	Belanja Modal Pengadaan alat pengering gabah
5.2.3.09.03	Belanja Modal Pengadaan mesin bajak
5.2.3.09.04	Belanja Modal Pengadaan alat penetas
5.2.3.09.05	Belanja Modal Alat pemantau kualitas air
5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah
5.2.3.09.07	Belanja Modal Alat pemotong rumput
5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer
5.2.3.09.09	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Pertanian
5.2.3.09.11	Belanja Modal Pengadaan Diesel

KODE	URAIAN
5.2.3.09.12	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembuatan Pakan
5.2.3.09.13	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan
5.2.3.09.14	Belanja Modal Pengadaan Karamba
5.2.3.09.15	Belanja Modal Pengadaan Karamba Mesin Gergaji
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.03	Belanja Modal Pengadaan mesin stensil
5.2.3.10.04	Belanja Modal Pengadaan mesin fotocopy
5.2.3.10.05	Belanja Modal Pengadaan mesin cetak
5.2.3.10.06	Belanja Modal Pengadaan mesin jilid
5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan mesin potong kertas
5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas
5.2.3.10.09	Belanja Modal Pengadaan papan tulis elektronik
5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan papan visual elektronik
5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik
5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Papan Data
5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating
5.2.3.10.16	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel
5.2.3.10.17	Belanja Modal Pengadaan Terpal
5.2.3.10.18	Belanja Modal Money Detector Ultraviolet
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.01	Belanja Modal Pengadaan meja gambar
5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari
5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas
5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet
5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white board
5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan penunjuk waktu
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman
5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan Layar
5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Terop
5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Logo/Lambang
5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Valum
5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tangga
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe / server
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer
5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scainer
5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU
5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

KODE	URAIAN
5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat
5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan meja makan
5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
5.2.3.13.06	Belanja Modal Pengadaan kursi makan
5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur
5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa
5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa
5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu
5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Mimbar/Podium
5.2.3.13.13	Belanja Modal Pengadaan Meja Rias
5.2.3.13.14	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis/White Board
5.2.3.13.15	Dst
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapnr
5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan tabung gas
5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan kompor gas
5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan lemari makan
5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan dispenser
5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan kulkas
5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan rak piring
5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau
5.2.3.14.08	Belanja Modal Pengadaan Majig Jar
5.2.3.14.09	Belanja Modal Mesin Cuci
5.2.3.14.11	Belanja Modal Trolly Food
5.2.3.14.12	Belanja Modal Kompor BiogasPengadaan Mesin Pengering
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.01	Belanja Modal Pengadaan lampu hias
5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan jam dinding / meja
5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan TV dan kelengkapannya
5.2.3.15.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu
5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan VCD Player/DVD
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan handycam
5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor
5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Alat kelengkapan studio
5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system
5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan wireles set

KODE	URAIAN
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan telepon
5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan faximile
5.2.3.17.03	Belanja Modal Pengadaan radio SSB
5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)
5.2.3.17.05	Belanja Modal Pengadaan radio VHF
5.2.3.17.06	Belanja Modal Pengadaan radio UHF
5.2.3.17.07	Belanja Modal Pengadaan alat Sandi
5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan timbangan
5.2.3.18.02	Belanja Modal Pengadaan teodolite
5.2.3.18.03	Belanja Modal Pengadaan alat uji emisi
5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan alat GPS
5.2.3.18.05	Belanja Modal Pengadaan kompas / peralatan navigasi
5.2.3.18.06	Belanja Modal Pengadaan bejana ukur
5.2.3.18.07	Belanja Modal Pengadaan barometer
5.2.3.18.08	Belanja Modal Pengadaan seismograph
5.2.3.18.09	Belanja Modal Pengadaan Ultrasonograph
5.2.3.18.10	Belanja Modal Fisk Finder
5.2.3.18.12	Belanja Modal Meteran
5.2.3.18.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Centrifuge Extractor Test
5.2.3.18.14	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Aspal
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
5.2.3.19.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT
5.2.3.19.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata
5.2.3.19.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah
5.2.3.19.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak
5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5.2.3.19.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5.2.3.19.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi
5.2.3.19.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Neurologi
5.2.3.19.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi
5.2.3.19.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan
5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi
5.2.3.19.14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam / Internis
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi
5.2.3.20.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika / Geologi / Geodesi
5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia
5.2.3.20.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pertanian
5.2.3.20.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peternakan
5.2.3.20.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Perkebunan

KODE	URAIAN
5.2.3.20.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Perikanan
5.2.3.20.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa
5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktek Sekolah
5.2.3.20.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya.....
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
5.2.3.21.02	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan fly over
5.2.3.21.03	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan under pas
5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan lingkungan
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan gantung
5.2.3.22.02	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan ponton
5.2.3.22.03	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan jalan orang
5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan
5.2.3.23.02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi waduk
5.2.3.23.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal permukaan
5.2.3.23.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal bawah tanah
5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih/air minum
5.2.3.23.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir
5.2.3.23.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pintu air
5.2.3.23.09	Belanja Modal Kontruksi Drainase
5.2.3.23.10	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
5.2.3.23.11	Belanja Modal Kontruksi Sumur Bor/Gas
5.2.3.23.12	Belanja Modal Konstruksi Konservasi
5.2.3.23.13	Belanja Modal Pembuatan Jalur Labuh Perahu
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5.2.3.24.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan
5.2.3.24.02	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman
5.2.3.24.03	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Hutan Kota
5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
5.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon
5.2.3.25.03	Belanja modal pengadaan instalasi air
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian gedung kantor
5.2.3.26.02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian rumah jabatan
5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian rumah dinas
5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian gedung gudang
5.2.3.26.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian bangunan bersejarah

KODE	URAIAN
5.2.3.26.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian bangunan monumen
5.2.3.26.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian tugu batas Kabupaten
5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Rambu - rambu
5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Wisata
5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Fasilitas Sanitasi
5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian MCK
5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Kios Pedagang
5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Terminal
5.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Pasar
5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Stadion Olah raga
5.2.3.26.17	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Sarana dan Prasarana Persampahan
5.2.3.26.18	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Menara
5.2.3.26.19	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Tempat Tanaman
5.2.3.26.20	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembangunan Rumah Layak Huni
5.2.3.26.21	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Unit Pembenihan Rakyat
5.2.3.26.22	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Penerangan Jalan dan Taman
5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Kolam / Pembelian Bangunan Kolam
5.2.3.26.24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Mess
5.2.3.26.25	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Taman
5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
5.2.3.26.27	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tempat Parkir
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan
5.2.3.27.01	Belanja Modal pengadaan Buku matematika
5.2.3.27.02	Belanja Modal pengadaan Buku fisika
5.2.3.27.03	Belanja Modal pengadaan Buku kimia
5.2.3.27.04	Belanja Modal pengadaan Buku biologi
5.2.3.27.05	Belanja Modal pengadaan Buku biografi
5.2.3.27.06	Belanja Modal pengadaan Buku geografi
5.2.3.27.07	Belanja Modal pengadaan Buku astronomi
5.2.3.27.08	Belanja Modal pengadaan Buku arkeologi
5.2.3.27.09	Belanja Modal pengadaan Buku bahasa dan sastra
5.2.3.27.10	Belanja Modal pengadaan Buku keagamaan
5.2.3.27.11	Belanja Modal pengadaan Buku sejarah
5.2.3.27.12	Belanja Modal pengadaan Buku seni dan budaya
5.2.3.27.13	Belanja Modal pengadaan Buku perpustakaan
5.2.3.27.14	Belanja Modal pengadaan Buku ilmu pengetahuan sosial
5.2.3.27.15	Belanja Modal pengadaan Buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5.2.3.27.16	Belanja Modal pengadaan Buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5.2.3.27.17	Belanja Modal pengadaan Buku ensiklopedia
5.2.3.27.18	Belanja Modal pengadaan Buku kamus bahasa
5.2.3.27.19	Belanja Modal pengadaan Buku ekonomi dan keuangan
5.2.3.27.20	Belanja Modal pengadaan Buku industri dan perdagangan
5.2.3.27.21	Belanja Modal pengadaan Buku peraturan perundang - undangan
5.2.3.27.22	Belanja Modal pengadaan Buku naskah
5.2.3.27.23	Belanja Modal pengadaan Buku terbitan berkala (Jurnal, Compact Disk)
5.2.3.27.24	Belanja Modal pengadaan mikrofilm

KODE	URAIAN
5.2.3.27.25	Belanja Modal pengadaan peta / atlas / globe
5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Pelajaran
5.2.3.27.27	Belanja Modal Peta Tematik
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
5.2.3.28.01	Belanja Modal Pengadaan lukisan / foto
5.2.3.28.02	Belanja Modal Pengadaan patung
5.2.3.28.03	Belanja Modal Pengadaan ukiran
5.2.3.28.04	Belanja Modal Pengadaan pahatan
5.2.3.28.05	Belanja Modal Pengadaan batu alam
5.2.3.28.06	Belanja Modal Pengadaan maket / miniatur / diorama
5.2.3.28.07	Belanja Modal Gamelan
5.2.3.28.08	Belanja Modal Alat Musik
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman
5.2.3.29.01	Belanja Modal Pengadaan Rewan Kebun Binatang
5.2.3.29.02	Belanja Modal Pengadaan ternak
5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan tanaman
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan / Keamanan
5.2.3.30.01	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api
5.2.3.30.02	Belanja Modal Pengadaan Radar
5.2.3.30.03	Belanja Modal Pengadaan mobil water canon
5.2.3.30.04	Belanja Modal Pengadaan borgol
5.2.3.30.05	Belanja Modal Pengadaan sangkur / bayonet
5.2.3.30.06	Belanja Modal Pengadaan perisai / tameng
5.2.3.30.07	Belanja Modal Pengadaan detektor logam
5.2.3.30.08	Belanja Modal Pengadaan rompi anti peluru
5.2.3.30.09	Belanja Modal Pengadaan pentungan
5.2.3.30.10	Belanja Modal Pengadaan helm
5.2.3.30.11	Belanja Modal Pengadaan alarm / sirine
5.2.3.30.12	Belanja Modal Pengadaan sentolop / senter
5.2.3.30.13	Belanja Modal Pengadaan baju pelampung / pelampung
5.2.3.30.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam
5.2.3.30.15	Belanja Modal Pengadaan Teropong
5.2.3.30.16	Belanja Modal Pengadaan Papan Selancar
5.2.3.31	Belanja Modal Dana BOS
5.2.3.31.01	Belanja Modal Dana BOS
5.2.3.32	Belanja Modal Dana BLUD
5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
5.2.3.33.01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek
5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek
5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis
5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah Medis

KODE	URAIAN
5.2.3.36	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis
5.2.3.36.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Central Gas Medis

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 15 TAHUN 2015****TANGGAL : 20 - 5 - 2015****KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

KODE	URAIAN
	PEMBIAYAAN DAERAH
6.1	<u>Penerimaan Pembiayaan Daerah</u>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
6.1.1.01	Pelampauan penerimaan PAD
6.1.1.01.01	Pajak Daerah
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang sah
6.1.1.02	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6.1.1.02.03	Dana Alokasi Umum
6.1.1.02.04	Dana Alokasi Khusus
6.1.1.03	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6.1.1.03.01	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6.1.1.03.02	Penerimaan Lain-lain
6.1.1.03.03	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
6.1.1.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
6.1.1.03.05	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa
6.1.1.04.04	Belanja Modal
6.1.1.04.05	Belanja Bunga
6.1.1.04.06	Belanja Subsidi
6.1.1.04.07	Belanja Hibah
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial
6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga
6.1.1.04.12	Dst
6.1.1.05	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
6.1.1.05.01	Uang Jaminan
6.1.1.05.02	Potongan Taspen
6.1.1.05.03	Potongan Beras
6.1.1.05.04	Askes
6.1.1.05.05	Dst.....

KODE	URAIAN
6.1.1.06	Kegiatan lanjutan
6.1.1.06.01	Kegiatan lanjutan
6.1.1.06.02	Dst.....
6.1.1.07	Pelampauan Penerimaan Piutang
6.1.1.07.01	Pelampauan Pencairan Dana Cadangan
6.1.1.07.02	Pelampauan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.1.07.03	Pelampauan Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.1.07.04	Pelampauan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.1.07.05	Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah
6.1.1.07.06	Pelampauan Penerimaan Pengembalian Modal Investasi
6.1.1.07.07	Dst
6.1.1.08	Penghematan Pengeiuaran Pembiayaan
6.1.1.08.01	Penghematan Pembentukan Dana Cadangan
6.1.1.08.02	Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.1.1.08.03	Penghematan Pembiayaan Pokok Utang
6.1.1.08.04	Penghematan Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.1.08.05	Dst
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.02	Dst.....
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.3.01	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
6.1.3.01.01	BUMD.....
6.1.3.01.02	Dst.....
6.1.3.02	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
6.1.3.02.01	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yg dikerjasamakan dgn pihak ketiga
6.1.3.02.02	Dst.....
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman.....
6.1.4.01.01	Dst.....
6.1.4.02	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.4.02.01	Pemerintah daerah
6.1.4.02.02	Dst.....
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.4.03.01	Bank
6.1.4.03.02	Dst.....

KODE	URAIAN
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.4.04.01	Lembaga keuangan bukan bank
6.1.4.04.02	Dst.....
6.1.4.05	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah
6.1.4.05.01	Obligasi atas nama..
6.1.4.05.02	Obligasi Nomor
6.1.4.05.03	Dst.....
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.5.01.02	Dst.....
6.1.6	Penerimaan piutang daerah
6.1.6.01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6.1.6.01.01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6.1.6.01.02	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6.1.6.01.03	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
6.1.6.01.04	Dst.....
6.1.6.02	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.1.6.02.01	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah provinsi
6.1.6.02.02	Dst.....
6.1.6.03	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.6.03.01	Pemerintah daerah
6.1.6.03.02	Dst.....
6.1.6.04	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.6.04.01	Bank.....
6.1.6.04.02	Dst.....
6.1.6.05	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.6.05.01	Lembaga keuangan bukan bank
6.1.6.05.02	Dst.....
6.1.6.06	Penerimaan piutang Revolping
6.1.6.06.01	Penerimaan Piutang Revolping
6.1.6.06.02	Penerimaan Piutang
6.1.7	Penerimaan dari Selisih Bayar
6.1.7.01	Penerimaan dari Selisih Bayar Kasda
6.1.7.01.01	Penerimaan dari Selisih Bayar Kasda
6.1.7.06	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
6.1.7.06.01	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
6.1.7.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat

KODE	URAIAN
6.2	<u>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</u>
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.02	Dst.....
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.2.2.01	Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
6.2.2.01.01	BUMN
6.2.2.01.02	Dst.....
6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)
6.2.2.02.01	Bank Jatim
6.2.2.02.02	Bank Perkreditan
6.2.2.02.03	Perusahaan Daerah Air Minum
6.2.2.02.04	Perusda Batu Alam
6.2.2.02.05	Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)
6.2.2.02.06	Perusahaan Daerah Aneka Usaha
6.2.2.03	Badan usaha milik swasta
6.2.2.03.01	Dana Bergulir Koperasi
6.2.2.03.02	Dst.....
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.01.01	Penerusan pinjaman (SLA)
6.2.3.01.02	Rekening Dana Investasi (RDI)
6.2.3.02	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain
6.2.3.02.01	Pemerintah daerah.....
6.2.3.02.02	Dst.....
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank
6.2.3.03.01	Bank BRI
6.2.3.03.02	Dst.....
6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
6.2.3.04.01	Lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.04.02	Dst.....
6.2.3.05	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.05.01	Penerusan pinjaman.....
6.2.3.05.02	Dst.....
6.2.3.06	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain
6.2.3.06.01	Pemerintah daerah
6.2.3.06.02	Dst.....

KODE	URAIAN
6.2.3.07	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
6.2.3.07.01	Bank.....
6.2.3.07.02	Dst.....
6.2.3.08	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.08.01	Lembaga Keuangan bukan bank.....
6.2.3.08.02	Dst.....
6.2.3.09	Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo
6.2.3.09.01	Obligasi atas nama.....
6.2.3.09.02	Obligasi nomor.....
6.2.3.09.03	Dst.....
6.2.3.10	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo
6.2.3.10.01	Obligasi atas nama.....
6.2.3.10.02	Obligasi nomor.....
6.2.3.10.03	Dst.....
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.4.01	Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah
6.2.4.01.01	Pemerintah
6.2.4.02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain
6.2.4.02.01	Pemerintah daerah lain
6.2.4.02.02	Dst.....
6.2.4.03	Pemberian Pinjaman Revolping
6.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman Revolping
6.2.4.03.02	Pemberian Pinjaman
6.2.5	Pengeluaran dari selisih bayar
6.2.5.01	Pengeluaran dari selisih bayar kas daerah
6.2.5.01.01	Pengeluaran dari selisih bayar kas daerah
6.2.5.01.02	Pengeluaran xxx
<u>6.3</u>	<u>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</u>
8.	Rekening Koran Antar Unit
8.1.	RK BUD
8.1.1.	RK BUD terhadap Bendahara Penerimaan SKPD
8.1.2.	RK BUD terhadap Bendahara Pengeluaran SKPD
8.1.3	RK BUD terhadap Pengurus Barang SKPD

KODE	URAIAN
8.2.	RK SKPD
8.2.1.	RK Bendahara Penerimaan SKPD terhadap BUD
8.2.2.	RK Bendahara Pengeluaran SKPD terhadap BUD
8.2.3.	RK Pengurus Barang SKPD terhadap BUD

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO